



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.02/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
 - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.
 - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - b. Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian.

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau

- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

 AGN

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/PMK.02/2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)			
	a SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	57.660.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	373.618.500	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	686.906.250	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.348.291.500	
	5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.557.150.000	
	b SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	175.400.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	292.500.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	438.900.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	497.500.000	
2	Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)			
	a SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	19.320.000	
	2) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	124.639.500	
	3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	229.068.750	
	4) Dokumen LAKIN 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	449.530.500	
	5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker	1 Dokumen	519.150.000	
	b SBK Dokumen LAKIN untuk K/L			
	1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	58.500.000	
	2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	97.500.000	
	3) Dokumen LAKIN untuk K/L unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	146.300.000	
	4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10 unit	1 Dokumen	165.820.000	
3	Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)			
	a Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	1 Per Peserta	30.261.000	
	b Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	22.125.000	
	c Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	20.230.000	
4	Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)			
	a Diklat Prajabatan Golongan I dan II	1 Per Peserta	9.296.000	
	b Diklat Prajabatan Golongan III	1 Per Peserta	9.296.000	
	c Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Per Peserta	2.242.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)			
	a SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Aceh	1 LHA	45.000.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	43.400.000	
	3) Riau	1 LHA	39.700.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	41.300.000	
	5) Jambi	1 LHA	38.800.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	40.800.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	40.000.000	
	8) Lampung	1 LHA	35.500.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	39.700.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	37.100.000	
	11) Banten	1 LHA	32.400.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	32.300.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	23.300.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	37.100.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	41.200.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	40.700.000	
	17) Bali	1 LHA	46.300.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	43.100.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	47.500.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	40.100.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	41.400.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	40.700.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	44.900.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	43.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	47.100.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	46.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	46.300.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	44.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	47.800.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	44.700.000	
	31) Maluku	1 LHA	54.800.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	52.200.000	
	33) Papua	1 LHA	60.700.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	66.300.000	
	b SBK Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Aceh	1 LHA	57.900.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	56.300.000	
	3) Riau	1 LHA	52.600.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	54.200.000	
	5) Jambi	1 LHA	51.700.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	53.700.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	52.900.000	
	8) Lampung	1 LHA	48.400.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	52.600.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	50.000.000	
	11) Banten	1 LHA	45.300.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	45.200.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	50.000.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.100.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	53.600.000	
	17) Bali	1 LHA	59.200.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.000.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.400.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	53.000.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	54.300.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	53.600.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	57.800.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	56.100.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	60.000.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	58.900.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	59.200.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	57.200.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	60.700.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	57.600.000	
	31) Maluku	1 LHA	67.700.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	65.100.000	
	33) Papua	1 LHA	73.600.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	79.200.000	
	c SBK Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Aceh	1 LHA	124.100.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	118.500.000	
	3) Riau	1 LHA	105.400.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	122.500.000	
	5) Jambi	1 LHA	106.900.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	113.800.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	124.600.000	
	8) Lampung	1 LHA	93.000.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	114.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	98.700.000	
	11) Banten	1 LHA	107.500.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	100.300.000	
	13) Jawa Tengah	1 LHA	99.300.000	

Abw

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	136.100.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	118.700.000	
	16) Bali	1 LHA	160.900.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	127.400.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.100.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	113.400.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	123.400.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	115.000.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	138.700.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	121.400.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	130.000.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	122.300.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	120.600.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	129.900.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	138.400.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	125.900.000	
	30) Maluku	1 LHA	156.900.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	141.700.000	
	32) Papua	1 LHA	177.000.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	186.600.000	

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000	
2	SBK Riset Dasar			
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000	
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000	
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000	
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000	
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000	
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000	
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000	
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000	
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000	
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000	
	k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000	
	l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000	
	n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000	
	o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000	
3	SBK Riset Terapan			
	a SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000	
	b SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000	
	c SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000	
	d SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000	
	e SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000	
	f SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000	
	g SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000	
	h SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000	
	i SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000	
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah Kebijakan	100.000.000	
	k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	175.000.000	
	l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah Kebijakan	300.000.000	
	m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah Kebijakan	490.000.000	
	n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah Kebijakan	675.000.000	
	o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	650.000.000	
4	SBK Riset Pengembangan			
	a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000	
	b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	1.134.800.000	
	c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000	
	d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000	
	e SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000	
	f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000	
	g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000	
	h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000	
	i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000	
	j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000	
5	SBK Kajian Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	70.000.000	

L Agw

PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)

SBK Dokumen RKA-K/L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L

SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat



SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L

SBK Dokumen LAKIN untuk K/L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4 Aw

5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang didalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama

SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.

- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota

SBK Audit Kinerja Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.

- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi

SBK Audit Kinerja Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

B. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PENELITIAN

1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:



- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2. SBK Riset Dasar

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset

 AGW

Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

Agw

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi,

Abw

model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

1. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek

↳ Abw

penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

3. SBK Riset Terapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi,

Abu

integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah



sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.

h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman

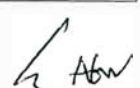
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur

 Abw

terhadap objek yang ada didalam negeri.

- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri.

- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah

 Abw

dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4. SBK Riset Pengembangan

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe

Abw

sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat

4 Abn

kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.

i. **SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan**

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. **SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan**

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

5. SBK Kajian Aktual Strategis

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

Abu

- g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan; dan/atau
 - h. artikel populer di media cetak.
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/ *sequence* DNA penambahan; dan/atau
 - n. temuan senyawa/ *sequence* DNA baru.
4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;

- f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi,

Abw

- domestikasi, *breeding*;
- p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
- r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
- d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
- f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
- g. paten/hak cipta terdaftar;
- h. paten/hak cipta *granted*;
- i. paten/hak cipta terpakai di industri;
- j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
- k. galur perbaikan;
- l. PVT/varietas terdaftar pangan;
- m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
- n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
- o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
- r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
- d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;

Abw

- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding* (ornamental);
 - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *preklinis*; dan/atau
 - w. herbal terstandar.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri; dan/atau
 - j. taman tematik, kebun, koleksi.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-

Abw

Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/Internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial* fase 1;
 - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial* fase 2; dan/atau
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial* fase 3.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000



No	Uraian	Besaran
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000

No	Uraian	Besaran
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 /PMK.02/2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Penilaian Kompetensi	500 Laporan	4.475.892.000	
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu			
	2 Laporan Reviu SPM Kelembagaan	4 Laporan	1.344.158.000	
	3 Laporan Reviu atas Konsep Laporan Keuangan BPK	3 Laporan	3.353.449.000	
	4 Laporan Reviu Atas Konsep RKA-K/L BPK	1 Laporan	496.914.000	
	5 Laporan Hasil Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	1.950.066.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	6 Laporan Pemberkasan	1 Laporan	127.025.000	
	7 Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	198.447.000	
	8 LHPI Inspektorat Utama	1 Laporan	210.800.000	
	Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara			
	9 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	767.788.000	
	10 Diklat Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan	1 Angkatan	184.390.000	
	11 Diklat Peningkatan Keterampilan Kelembagaan	1 Angkatan	183.756.000	
	12 Diklat Sertifikasi Akuntan Publik	1 Angkatan	97.943.000	
	13 Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	95.855.000	
	14 Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	1 Angkatan	95.655.000	
004.02	BPK Pusat			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 LHP LK Pemerintah Pusat	1 LHP	11.187.760.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	2 Laporan hasil evaluasi KAP	1 Laporan	182.465.000	
	3 LHP AKN I	1 LHP	990.000.000	
	4 LHP AKN II	1 LHP	1.491.703.000	
	5 LHP AKN III	1 LHP	790.913.000	
	6 LHP AKN IV	1 LHP	1.972.617.000	
	7 LHP AKN V	1 LHP	1.646.265.000	
	8 LHP AKN VI	1 LHP	1.907.926.000	
	9 LHP AKN VII	1 LHP	991.946.000	
	10 LHP Investigatif	1 LHP	793.629.000	
	11 LHP Tematik	1 LHP	8.034.014.000	
	12 LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	473.311.000	
	13 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumut	1 LHP	394.690.000	
	14 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	390.793.000	
	15 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepri	1 LHP	366.627.000	
	16 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	358.734.000	
	17 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumbar	1 LHP	361.855.000	
	18 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumsel	1 LHP	419.810.000	
	19 LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	358.005.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	20 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	380.700.000	
	21 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel	1 LHP	410.000.000	
	22 LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	401.322.000	
	23 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jabar	1 LHP	449.000.000	
	24 LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	795.168.000	
	25 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jateng	1 LHP	420.000.000	
	26 LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta	1 LHP	363.450.000	
	27 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jatim	1 LHP	422.956.000	
	28 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	478.227.000	
	29 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTB	1 LHP	372.161.000	
	30 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT	1 LHP	426.591.000	
	31 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalbar	1 LHP	429.031.000	
	32 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalteng	1 LHP	388.392.000	
	33 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalsel	1 LHP	434.097.000	
	34 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim	1 LHP	503.745.000	
	35 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltara	1 LHP	431.592.000	
	36 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulut	1 LHP	450.550.000	
	37 LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	363.691.000	
	38 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulbar	1 LHP	385.718.000	
	39 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulsel	1 LHP	443.961.000	
	40 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulteng	1 LHP	399.605.000	
	41 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sultra	1 LHP	394.524.000	
	42 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	400.000.000	
	43 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	402.852.000	
	44 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	490.330.000	
	45 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	490.706.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Pemantauan AKN I			
	46 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	48.059.000	
	47 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	59.219.000	
	Laporan Pemantauan AKN II			
	48 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	45.739.000	
	49 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	59.219.000	
	Laporan Pemantauan AKN III			
	50 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	45.413.000	
	51 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	57.993.000	
	Laporan Pemantauan AKN IV			
	52 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	46.426.000	
	53 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	59.219.000	
	Laporan Pemantauan AKN V			
	54 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	48.433.000	
	55 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	126.473.000	
	Laporan Pemantauan AKN VI			
	56 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	47.573.000	
	57 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	57.897.000	

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Pemantauan AKN VII			
58	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	44.302.000	
59	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	59.219.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh			
60	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.973.000	
61	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.834.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumut			
62	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.733.000	
63	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.058.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau			
64	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.493.000	
65	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.070.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepri			
66	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.153.000	
67	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.238.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi			
68	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.727.000	
69	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.264.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar			
70	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.793.000	
71	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.230.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel			
72	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.973.000	
73	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.122.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Lampung			
74	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.793.000	
75	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.638.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu			
76	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.793.000	
77	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.058.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel			
78	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.673.000	
79	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.146.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Banten			
80	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.213.000	
81	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.842.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jabar			
82	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.973.000	
83	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.378.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta			
84	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	30.890.000	
85	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	51.906.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jateng			
86	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.373.000	
87	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	23.994.000	

h Atw

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta			
88	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.193.000	
89	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	32.146.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jatim			
90	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.913.000	
91	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.786.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bali			
92	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.853.000	
93	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	36.634.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTB			
94	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.673.000	
95	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.950.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTT			
96	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.913.000	
97	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.594.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar			
98	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.963.000	
99	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.822.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalteng			
100	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.133.000	
101	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.002.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel			
102	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.793.000	
103	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.538.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kaltim			
104	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.913.000	
105	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	36.138.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulut			
106	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.093.000	
107	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.762.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo			
108	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.673.000	
109	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.994.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulbar			
110	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.113.000	
111	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.986.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel			
112	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.153.000	
113	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.650.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulteng			
114	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.673.000	
115	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.054.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sultra			
116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.913.000	
117	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.486.000	

Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku			
	118 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	9.053.000	
	119 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	39.618.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Malut			
	120 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	10.253.000	
	121 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.514.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua			
	122 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	10.653.000	
	123 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	45.338.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat			
	124 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	10.413.000	
	125 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	40.386.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara			
	126 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	8.673.000	
	127 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.960.000	

ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Putusan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali			
	1 Penyelesaian Perkara Pidana Umum	1 Perkara	1.460.766	
	2 Penyelesaian Perkara Pidana Khusus	1 Perkara	1.502.234	
	3 Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta rupiah	1 Perkara	1.102.920	
	4 Penyelesaian Perkara Pidana Militer	1 Perkara	1.205.333	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan			
	1 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kupang	1 perkara	925.000	
	2 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Ambon	1 perkara	775.000	
	3 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	1.800.000	
	4 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Papua	1 perkara	2.350.000	
	5 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Aceh	1 perkara	1.450.000	
	6 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Utara	1 perkara	1.550.000	
	7 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Barat	1 perkara	1.550.000	
	8 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Riau	1 perkara	1.550.000	
	9 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jambi	1 perkara	1.550.000	
	10 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Selatan	1 perkara	1.550.000	
	11 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bengkulu	1 perkara	1.550.000	
	12 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Lampung	1 perkara	775.000	
	13 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.075.000	
	14 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kepulauan Riau	1 perkara	775.000	
	15 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	875.000	
	16 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	1.750.000	
	17 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah DI Yogyakarta	1 perkara	1.650.000	
	18 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Timur	1 perkara	1.550.000	
	19 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Banten	1 perkara	1.550.000	
	20 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Barat	1 perkara	1.450.000	
	21 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Tengah	1 perkara	1.550.000	
	22 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Selatan	1 perkara	1.750.000	
	23 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Timur	1 perkara		

✓ Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	24 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Utara	1 perkara	1.550.000	
	25 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Gorontalo	1 perkara	1.550.000	
	26 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Tengah	1 perkara	1.550.000	
	27 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Selatan	1 perkara	1.750.000	
	28 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 perkara	1.550.000	
	29 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bali	1 perkara	975.000	
	30 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 perkara	875.000	
	Perkara yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu			
	31 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	597.800	
	32 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	944.300	
	33 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	1.573.000	
	34 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	796.000	
	35 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	897.000	
	36 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	569.000	
	37 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	915.500	
	38 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.521.000	
	39 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	956.000	
	40 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.057.000	
	41 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	590.200	
	42 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	936.700	
	43 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	1.553.000	
	44 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	876.000	
	45 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	977.000	
	46 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	689.800	
	47 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.036.300	
	48 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.665.000	
	49 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	956.000	
	50 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	1.057.000	
	51 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh	1 Perkara	672.800	
	52 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh	1 Perkara	1.004.900	
	53 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh	1 Perkara	1.497.000	
	54 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Aceh	1 Perkara	816.000	
	55 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Aceh	1 Perkara	1.042.000	
	56 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara	1 Perkara	695.500	
	57 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara	1 Perkara	1.028.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	58 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara	1 Perkara	1.507.000	
	59 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Utara	1 Perkara	816.000	
	60 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Utara	1 Perkara	1.042.000	
	61 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat	1 Perkara	694.500	
	62 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat	1 Perkara	1.027.000	
	63 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat	1 Perkara	1.503.000	
	64 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Barat	1 Perkara	816.000	
	65 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Barat	1 Perkara	1.042.000	
	66 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	694.000	
	67 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.026.500	
	68 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.501.000	
	69 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	816.000	
	70 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	1.042.000	
	71 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	694.000	
	72 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.026.500	
	73 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.501.000	
	74 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	816.000	
	75 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.042.000	
	76 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan	1 Perkara	695.000	
	77 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan	1 Perkara	1.027.500	
	78 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan	1 Perkara	1.505.000	
	79 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Selatan	1 Perkara	816.000	
	80 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Selatan	1 Perkara	1.042.000	
	81 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	695.000	
	82 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.027.500	
	83 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.505.000	
	84 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	816.000	
	85 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.042.000	
	86 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	694.500	
	87 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.027.000	
	88 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.503.000	
	89 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	816.000	
	90 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.042.000	
	91 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	695.000	
	92 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	1.027.500	
	93 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	1.505.000	
	94 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	816.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	95 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	1.042.000	
	96 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	593.700	
	97 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	924.600	
	98 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	1.495.000	
	99 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	796.000	
	100 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	1.022.000	
	101 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jawa Barat	1 Perkara	543.200	
	102 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	889.700	
	103 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	1.376.000	
	104 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	796.000	
	105 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	897.000	
	106 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	548.000	
	107 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	896.500	
	108 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	1.501.000	
	109 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	796.000	
	110 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	897.000	
	111 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	542.200	
	112 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	889.700	
	113 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	1.533.000	
	114 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	796.000	
	115 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	897.000	
	116 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	562.600	
	117 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	909.100	
	118 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	1.517.000	
	119 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	796.000	
	120 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	897.000	
	121 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 Perkara	549.500	
	122 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 Perkara	896.500	
	123 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 Perkara	1.533.000	
	124 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 Perkara	816.000	
	125 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 Perkara	897.000	
	126 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	553.500	
	127 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	890.000	
	128 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	1.507.000	
	129 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	836.000	
	130 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	937.000	
	131 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	533.400	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	132 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	885.100	
	133 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	1.501.000	
	134 Perkara Pidana yang Disampaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	796.000	
	135 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	937.000	
	136 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	538.000	
	137 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	886.500	
	138 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	1.501.000	
	139 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	796.000	
	140 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	897.000	
	141 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	547.200	
	142 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	895.700	
	143 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	1.533.000	
	144 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	796.000	
	145 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	897.000	
	146 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	538.000	
	147 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	886.500	
	148 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	1.501.000	
	149 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	796.000	
	150 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	897.000	
	151 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	555.000	
	152 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	896.500	
	153 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	1.517.000	
	154 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	776.000	
	155 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	877.000	
	156 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	560.500	
	157 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	902.000	
	158 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	1.515.000	
	159 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	836.000	
	160 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	937.000	
	161 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	583.200	
	162 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	929.700	
	163 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	1.541.000	
	164 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	836.000	
	165 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	937.000	
	166 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	549.500	
	167 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	896.000	
	168 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	1.515.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	169 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	776.000	
	170 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	877.000	
	171 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali	1 Perkara	604.900	
	172 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali	1 Perkara	955.400	
	173 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali	1 Perkara	1.567.000	
	174 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali	1 Perkara	816.000	
	175 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali	1 Perkara	917.000	
	176 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	554.200	
	177 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	900.700	
	178 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	1.537.000	
	179 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	796.000	
	180 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	897.000	
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara			
	181 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kupang	1 Perkara	810.000	
	182 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Ambon	1 Perkara	750.000	
	183 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	790.000	
	184 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jayapura	1 Perkara	910.000	
	185 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Aceh	1 Perkara	730.000	
	186 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	730.000	
	187 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	730.000	
	188 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	1 Perkara	730.000	
	189 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	1 Perkara	750.000	
	190 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Selatan	1 Perkara	750.000	
	191 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	750.000	
	192 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	1 Perkara	750.000	
	193 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Bangka Belitung	1 Perkara	750.000	
	194 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Kepulauan Riau	1 Perkara	750.000	
	195 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan DKI Jakarta	1 Perkara	870.000	
	196 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Jawa Barat	1 Perkara	790.000	
	197 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DI Yogyakarta	1 Perkara	790.000	
	198 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	770.000	
	199 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten	1 Perkara	750.000	
	200 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	750.000	
	201 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	450.200	
	202 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	750.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	203 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	790.000	
	204 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	750.000	
	205 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	750.000	
	206 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	750.000	
	207 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	790.000	
	208 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	750.000	
	209 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bali	1 Perkara	830.000	
	210 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	790.000	
	005.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Pendalaman Materi			
	1 Diklat Tenaga Teknis Peradilan/Pendalaman Materi	1 Orang	12.469.325	

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang Diseleenggarakan	1 Angkatan	35.397.100.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	2 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah I	1 Lapdu	3.700.000	
	3 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I	1 Lapdu	8.300.000	
	4 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah II	1 Lapdu	3.700.000	
	5 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II	1 Lapdu	8.300.000	
	6 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah III	1 Lapdu	3.700.000	
	7 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III	1 Lapdu	8.300.000	
	8 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah IV	1 Lapdu	3.700.000	
	9 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV	1 Lapdu	8.300.000	
	10 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah V	1 Lapdu	3.700.000	
	11 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V	1 Lapdu	8.300.000	

← Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
010.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Literatur 1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap GBPP/SAP 2 Penyusunan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP)/ SAP/ <i>Syllabus</i> (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap 3 Penyusunan Garis Besar Pokok Pelatihan (GBPP)/SAP/ <i>Syllabus</i> (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap	50	Literatur	2.090.031.000	
		15	GBPP/SAP/ <i>Syllabus</i>	546.660.000	
		12	GBPP/SAP/ <i>Syllabus</i>	249.895.000	
010.03	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Bantuan Keuangan Parpol 1 Jumlah Parpol yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dan Peningkatan Kapasitas	122.003.650	Suara	13.925.300.000	
010.06	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 1 Evaluasi Raperda tentang APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran APBD Provinsi 2 Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 3 Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	34	Peraturan	734.400.000	
		34	Peraturan	734.400.000	
		34	Peraturan	734.400.000	
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Pembelajaran 1 Diklat 3 Hari 2 Diklat 5 Hari Diklat Teknis Bidang Keuangan Daerah 3 Diklat 5 Hari Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajaan 4 Diklat 5 Hari Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jabfung Kemendagri 5 Diklat 5 Hari 6 Diklat 6 Hari 7 Diklat 7 Hari 8 Diklat 12 Hari 9 Diklat 15 Hari 10 Diklat 35 Hari Angkatan Diklat Teknis Pemerintah Daerah 11 Diklat 5 Hari	1	Angkatan	54.135.000	
		1	Angkatan	74.965.000	
		1	Angkatan	74.965.000	
		1	Angkatan	74.965.000	
		1	Angkatan	74.965.000	
		1	Angkatan	84.025.000	
		1	Angkatan	92.385.000	
		1	Angkatan	138.715.000	
		1	Angkatan	176.990.000	
		1	Angkatan	309.765.000	
		1	Angkatan	74.965.000	

Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian	1 Orang	4.032.000	
	2 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah	1 Orang	4.032.000	
	3 Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	4.032.000	
	4 Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko	1 Orang	5.732.000	
	5 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah	1 Orang	5.732.000	
	6 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia PA SAF	1 Orang	5.732.000	
	7 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Asing (Non Inggris)	1 Orang	4.032.000	
	8 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tk. Pertama Pertahanan	1 Orang	4.154.783	
	9 Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	4.189.644	
	10 Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.930.955	
	11 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	4.101.877	
	12 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tk. Muda Pertahanan	1 Orang	4.196.533	
	13 Lulusan Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan	1 Orang	4.044.433	
	14 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	4.936.933	
	15 Lulusan Kursus Manajemen Penanggulangan Bencana	1 Orang	5.277.175	
	16 Lulusan Kursus Manajemen Pembangunan Karakter Bangsa	1 Orang	5.522.550	
	17 Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Orang	3.921.433	
	18 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat	1 Orang	4.159.400	
	19 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan Jabatan Setingkat	1 Orang	4.159.400	
	20 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat	1 Orang	4.187.600	
	21 Lulusan Diklat Teknis Ahli Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Orang	3.972.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
	22 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	5.832.000	
	23 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.252.000	
	24 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	6.552.000	
	25 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	5.952.000	
	26 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	14.652.000	
	27 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.216.000	
	28 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.216.000	
	29 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.626.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
	30 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	11.856.000	
	31 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	13.536.000	
	32 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	14.736.000	
	33 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	12.336.000	
	34 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	47.136.000	
	35 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.105.000	
	36 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.150.000	
	37 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.699.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
	38 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	25.524.000	
	39 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	29.374.000	
	40 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	32.124.000	
	41 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	26.624.000	

4 Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
42	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1	Laporan	106.374.000
43	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1	Laporan	7.567.000
44	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1	Laporan	8.267.000
45	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1	Laporan	8.767.000
46	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1	Laporan	7.767.000
47	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1	Laporan	22.267.000
48	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1	Laporan	12.859.000
49	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1	Laporan	14.109.000
50	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1	Laporan	15.059.000
51	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1	Laporan	13.759.000
52	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1	Laporan	35.709.000
53	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	10.774.000
54	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1	Laporan	11.524.000
55	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1	Laporan	12.074.000
56	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1	Laporan	11.124.000
57	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1	Laporan	25.674.000
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
58	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1	Laporan	23.667.000
59	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1	Laporan	27.867.000
60	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1	Laporan	30.867.000
61	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1	Laporan	24.867.000
62	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1	Laporan	111.867.000
63	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1	Laporan	8.711.000
64	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1	Laporan	10.461.000
65	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1	Laporan	11.711.000
66	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1	Laporan	9.211.000
67	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1	Laporan	45.461.000
68	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1	Laporan	13.243.000
69	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1	Laporan	15.193.000
70	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1	Laporan	16.643.000
71	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1	Laporan	14.343.000
72	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1	Laporan	50.793.000
73	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	13.328.000
74	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1	Laporan	16.128.000
75	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1	Laporan	18.128.000
76	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1	Laporan	14.128.000
77	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1	Laporan	72.128.000
	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar			
78	KIBINA Tk. Dasar Sesko Matra	1	Orang	5.732.000
79	KIBINA Tk. Dasar Sesko TNI	1	Orang	5.732.000
	Lulusan Kursus Intensif Inggris			
80	KIBI Reguler	1	Orang	4.032.000
81	KIBI Executive, PNS Kemhan, TOEFL, Alih Bahasa, IELTS	1	Orang	4.032.000
	Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan BMN Pertahanan			
82	Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan	1	Orang	3.855.450

6 Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
012.21	83 Kursus Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Pertahanan	1	Orang	4.037.200	
	Lulusan Diklat Minu				
	84 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat II	1	Orang	3.595.900	
	85 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1	Orang	4.116.400	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan				
	86 Diklat Teknis Administrasi Jabatan Operator Komputer dan Jabatan Agendaris/Jabatan Setingkat	1	Orang	3.596.800	
	Markas Besar TNI				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	1 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Tempur TNI	1	Orang	260.116	
	2 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1	Orang	327.668	
	3 Peserta Operasi Rutin Integratif	1	Orang	57.988	
	4 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1	Orang	423.600	
	5 Lulusan Sesko TNI	1	Orang	5.911.290	
	6 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1	Orang	1.245.270	
	7 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1	Orang	111.272	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI				
	8 Perbatasan/Pulau Terluar	1	Orang	250.018	
	9 Daerah Rawan (Rahwan)	1	Orang	267.518	
	Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia				
	10 Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	1.679.673	
	11 Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	6.920.394	
	12 Seleksi Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	1.577.383	
	13 Kegiatan Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	9.206.766	
	14 Seleksi Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	2.205.366	
	15 Kegiatan Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	11.050.200	
	16 Seleksi Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	2.690.150	
	17 Kegiatan Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	12.722.260	
	18 Seleksi Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	2.819.833	
	19 Kegiatan Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	19.140.000	
	20 Seleksi Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	5.657.333	
	21 Kegiatan Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	38.630.500	
	22 Seleksi Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	4.097.888	
	23 Kegiatan Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	27.923.000	
	24 Seleksi Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	2.304.855	
	25 Kegiatan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1	Giat	7.794.803	
	26 Seleksi Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1	Giat	1.691.328	
	27 Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1	Giat	6.687.753	
	28 Seleksi Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1	Giat	1.681.028	
	29 Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1	Giat	6.566.318	
	30 Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo	1	Giat	1.671.271	
	31 Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo	1	Giat	7.771.360	
	32 Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1	Giat	1.582.037	
	33 Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1	Giat	7.665.725	
	34 Seleksi Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1	Giat	1.698.200	
	35 Kegiatan Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1	Giat	9.673.500	
	36 Seleksi Satgas IMT Filipina	1	Giat	1.861.833	
	37 Kegiatan Satgas IMT Filipina	1	Giat	534.832.666	
	Peserta Operasi Intelijen Rutin				
	38 Rayon I	1	Orang	150.148	
	39 Rayon II	1	Orang	153.148	
	40 Rayon III	1	Orang	159.148	
	41 Rayon IV	1	Orang	160.148	
	42 Rayon V	1	Orang	168.148	
	Calon Perwira Karier (PAPK)				
	43 Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Perwira Prajurit Karier TNI	1	Orang	16.420.000	
	Calon PSDP Penerbang				
	44 Seleksi penerimaan (Werving) Calon Perwira PSDP Pnb TNI	1	Orang	29.563.000	
	Calon Mahasiswa Beasiswa PAPK				
	45 Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa Calon PA PK TNI	1	Orang	16.216.000	
	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar				
	46 Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Pria)	1	Orang	8.287.866	
	47 Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita)	1	Orang	9.030.946	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	Lulusan Dikma Candradimuka Pratar				
48	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1	Orang	5.040.694	
	Lulusan Dikma Candradimuka Koptar				
49	Lulusan Dikma Candradimuka Koptar	1	Orang	5.304.413	
	Lulusan Dikma PSDP Penerbang				
50	Pendidikan Pertama (Dikma) PSDP Penerbang TNI	1	Orang	9.592.413	
	Lulusan Diklan PSDP Penerbang				
51	Pendidikan Lanjutan PSDP Penerbang TNI	1	Orang	8.638.716	
	Lulusan Dikma P A P K Pria				
52	Pendidikan Pertama (Dikma) PA PK Pria TNI	1	Orang	8.140.102	
	Lulusan Dikma P A P K Wanita				
53	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1	Orang	8.277.482	
	Peserta Sesko TNI				
54	Seleksi Dikreg Sesko TNI	1	Orang	1.000.000	
	Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi TNI				
55	Lulusan Dikbangspes Sus Pa TNI	1	Orang	3.995.783	
56	Lulusan Dikbangspes Sus Ba TNI	1	Orang	3.390.183	
57	Lulusan Dik SIP TNI	1	Orang	11.359.094	
58	Lulusan Susjab Kimil	1	Orang	4.166.240	
59	Lulusan Susjab Ormil TNI	1	Orang	4.166.240	
60	Lulusan Suspa Minlakhara	1	Orang	4.146.240	
61	Lulusan Suspa Masmil	1	Orang	4.146.240	
62	Kursus Perwira Dasar Intelijen	1	Orang	4.377.000	
63	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1	Orang	4.667.000	
64	Kursus Perwira Intelijen Strategis Tk.I	1	Orang	4.458.000	
65	Kursus Perwira Sandi dan Intelijen TNI	1	Orang	4.269.111	
66	Kursus Bintara Sandi dan Intelijen TNI	1	Orang	3.967.500	
67	Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI	1	Orang	4.001.666	
68	Sekolah Perwira Manajemen dan Analisis Intelijen	1	Orang	7.487.985	
69	Seleksi Kursus Perwira Manajemen dan Analisis Intelijen	1	Orang	1.723.852	
70	Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1	Orang	1.400.787	
71	Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1	Orang	1.352.825	
	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer				
72	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1	Laporan	21.614.000	
73	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1	Laporan	22.104.000	
74	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1	Laporan	22.454.000	
75	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1	Laporan	21.754.000	
76	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1	Laporan	31.904.000	
77	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1	1	Laporan	24.534.000	
78	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1	Laporan	28.104.000	
79	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1	Laporan	30.654.000	
80	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1	Laporan	25.554.000	
81	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1	Laporan	99.504.000	
82	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1	Laporan	1.342.000	
83	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1	Laporan	3.397.000	
84	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1	Laporan	3.957.000	
85	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1	Laporan	4.357.000	
86	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1	Laporan	3.557.000	
87	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1	Laporan	15.157.000	
88	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1	Laporan	1.719.000	
89	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1	Laporan	957.000	
90	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1	Laporan	1.027.000	
91	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1	Laporan	1.077.000	
92	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1	Laporan	977.000	
93	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1	Laporan	2.427.000	
	Laporan Pembinaan Napi				
94	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1	Laporan	106.200	
95	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1	Laporan	109.311	
96	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1	Laporan	111.533	
97	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1	Laporan	107.088	
98	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1	Laporan	171.533	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer				
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1	Laporan	5.832.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1	Laporan	6.252.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1	Laporan	6.552.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1	Laporan	5.952.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1	Laporan	14.652.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1	Laporan	2.216.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1	Laporan	2.216.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1	Laporan	2.626.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum				
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1	Laporan	11.856.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1	Laporan	13.536.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1	Laporan	14.736.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1	Laporan	12.336.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1	Laporan	47.136.000	
112	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1	Laporan	4.105.000	
113	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1	Laporan	3.150.000	
114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1	Laporan	5.699.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat				
115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1	Laporan	25.524.000	
116	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1	Laporan	29.374.000	
117	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1	Laporan	32.124.000	
118	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1	Laporan	26.624.000	
119	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1	Laporan	106.374.000	
120	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1	Laporan	7.567.000	
121	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1	Laporan	8.267.000	
122	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1	Laporan	8.767.000	
123	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1	Laporan	7.767.000	
124	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1	Laporan	22.267.000	
125	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1	Laporan	12.859.000	
126	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1	Laporan	14.109.000	
127	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1	Laporan	15.059.000	
128	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1	Laporan	13.759.000	
129	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1	Laporan	35.709.000	
130	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	10.774.000	
131	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	11.524.000	
132	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	12.074.000	
133	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	11.124.000	
134	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	25.674.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat				
135	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1	Laporan	23.667.000	
136	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1	Laporan	27.867.000	
137	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1	Laporan	30.867.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	138 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1	Laporan	24.867.000	
	139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1	Laporan	111.867.000	
	140 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 1	1	Laporan	8.711.000	
	141 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 2	1	Laporan	10.461.000	
	142 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 3	1	Laporan	11.711.000	
	143 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 4	1	Laporan	9.211.000	
	144 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 5	1	Laporan	45.461.000	
	145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1	Laporan	13.243.000	
	146 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1	Laporan	15.193.000	
	147 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1	Laporan	16.643.000	
	148 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1	Laporan	14.343.000	
	149 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1	Laporan	50.793.000	
	150 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	13.328.000	
	151 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1	Laporan	16.128.000	
	152 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1	Laporan	18.128.000	
	153 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1	Laporan	14.128.000	
	154 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1	Laporan	72.128.000	
012.22	Markas Besar TNI AD				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	1 Calon Taruna Matra Darat	1	Orang	23.200.000	
	2 Calon Bintara Matra Darat	1	Orang	5.800.000	
	3 Calon Tamtama Matra Darat	1	Orang	4.200.000	
	4 Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat	1	Orang	3.503.575	
	5 Lulusan Diksargolan Secapa	1	Orang	4.352.187	
	6 Lulusan Seskoal	1	Orang	4.434.702	
	7 Lulusan Selapa Matra Darat	1	Orang	3.619.445	
	8 Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat	1	Orang	3.354.070	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI				
	9 Rayon I	1	Orang	294.833	
	10 Rayon II	1	Orang	302.788	
	11 Rayon III	1	Orang	321.322	
	12 Rayon IV	1	Orang	331.588	
	13 Rayon V	1	Orang	345.933	
	Peserta Latihan Kematraan				
	14 Latihan Perorangan Rayon I	1	Orang	72.743	
	15 Latihan Perorangan Rayon II	1	Orang	74.278	
	16 Latihan Perorangan Rayon III	1	Orang	77.089	
	17 Latihan Perorangan Rayon IV	1	Orang	80.380	
	18 Latihan Perorangan Rayon V	1	Orang	86.969	
	19 Latihan Satuan Rayon I	1	Orang	50.528	
	20 Latihan Satuan Rayon II	1	Orang	52.896	
	21 Latihan Satuan Rayon III	1	Orang	54.561	
	22 Latihan Satuan Rayon IV	1	Orang	57.047	
	23 Latihan Satuan Rayon V	1	Orang	61.229	
	24 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon I	1	Orang	418.277	
	25 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon II	1	Orang	447.921	
	26 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon III	1	Orang	479.481	
	27 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon IV	1	Orang	511.644	
	28 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon V	1	Orang	573.549	
	29 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon I	1	Orang	998.012	
	30 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon II	1	Orang	1.038.159	
	31 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon III	1	Orang	1.069.363	
	32 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon IV	1	Orang	1.123.306	
	33 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon V	1	Orang	1.198.185	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri				
	34 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat Komersil	1	Orang	3.340.985	
	35 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat TNI AU	1	Orang	1.726.641	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri				
	36 Latma Internasional di dalam Negeri dengan Pelibatan Alutsista	1	Orang	295.376	
	37 Latma Internasional di dalam Negeri tanpa Alutsista	1	Orang	170.956	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	
	Lulusan Dikma Sertar				
38	Sersan Taruna Pria	1	Orang	6.128.133	
39	Sersan Taruna Wanita	1	Orang	6.370.466	
	Lulusan Dikma Sermadatar				
40	Sermadatar Pria	1	Orang	6.327.210	
41	Sermadatar Wanita	1	Orang	6.631.876	
	Lulusan Dikma Sermatutar				
42	Sermatutar Pria	1	Orang	6.815.820	
43	Sermatutar Wanita	1	Orang	7.029.097	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat				
44	Secaba Pria Rayon I	1	Orang	5.664.480	
45	Secaba Pria Rayon II	1	Orang	5.728.900	
46	Secaba Pria Rayon III	1	Orang	5.878.900	
47	Secaba Pria Rayon IV	1	Orang	5.913.320	
48	Secaba Pria Rayon V	1	Orang	6.097.740	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat				
49	Secaba Wanita	1	Orang	6.492.880	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Darat				
50	Secata Rayon I	1	Orang	5.539.340	
51	Secata Rayon II	1	Orang	5.603.100	
52	Secata Rayon III	1	Orang	5.753.100	
53	Secata Rayon IV	1	Orang	5.786.860	
54	Secata Rayon V	1	Orang	5.970.620	
	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat				
55	Diksargolan Perwira	1	Orang	5.081.700	
	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat				
56	Diksargolan Bintara Pria Rayon I	1	Orang	2.960.000	
57	Diksargolan Bintara Pria Rayon II	1	Orang	3.023.330	
58	Diksargolan Bintara Pria Rayon III	1	Orang	3.112.730	
59	Diksargolan Bintara Pria Rayon IV	1	Orang	3.147.460	
60	Diksargolan Bintara Pria Rayon V	1	Orang	3.330.790	
	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat				
61	Diksargolan Tamtama Rayon I	1	Orang	2.802.433	
62	Diksargolan Tamtama Rayon II	1	Orang	2.868.850	
63	Diksargolan Tamtama Rayon III	1	Orang	2.952.433	
64	Diksargolan Tamtama Rayon IV	1	Orang	2.993.516	
65	Diksargolan Tamtama Rayon V	1	Orang	3.074.243	
	Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat				
66	Rayon I	1	Orang	3.196.343	
67	Rayon II	1	Orang	3.258.725	
68	Rayon III	1	Orang	3.356.787	
69	Rayon IV	1	Orang	3.416.106	
70	Rayon V	1	Orang	3.573.487	
	Peserta Secapareg Matra Darat				
71	Rayon I	1	Orang	1.568.950	
72	Rayon II	1	Orang	1.578.390	
73	Rayon III	1	Orang	1.589.030	
74	Rayon IV	1	Orang	1.593.750	
75	Rayon V	1	Orang	1.597.270	
	Peserta Secabareg Matra Darat				
76	Rayon I	1	Orang	1.171.400	
77	Rayon II	1	Orang	1.185.440	
78	Rayon III	1	Orang	1.219.640	
79	Rayon IV	1	Orang	1.227.560	
80	Rayon V	1	Orang	1.268.480	
	Peserta Seskoad				
81	Rayon I	1	Orang	5.896.770	
82	Rayon II	1	Orang	5.923.170	
83	Rayon III	1	Orang	5.898.570	
84	Rayon IV	1	Orang	5.915.370	
85	Rayon V	1	Orang	5.996.970	
	Peserta Selapa Matra Darat				
86	Rayon I	1	Orang	3.920.910	
87	Rayon II	1	Orang	3.946.590	
88	Rayon III	1	Orang	4.013.990	
89	Rayon IV	1	Orang	4.025.310	
90	Rayon V	1	Orang	4.053.870	
	Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat				
91	Rayon I	1	Orang	2.801.900	
92	Rayon II	1	Orang	2.861.900	
93	Rayon III	1	Orang	3.011.900	
94	Rayon IV	1	Orang	3.044.600	
95	Rayon V	1	Orang	3.203.500	
	Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat				
96	Rayon I	1	Orang	2.699.200	
97	Rayon II	1	Orang	2.762.450	
98	Rayon III	1	Orang	2.846.750	
99	Rayon IV	1	Orang	2.882.000	
100	Rayon V	1	Orang	3.078.950	

Abw

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Peserta Dikbangspes Matra Darat			
101	Rayon I	1 Orang	1.113.560	
102	Rayon II	1 Orang	1.159.940	
103	Rayon III	1 Orang	1.162.640	
104	Rayon IV	1 Orang	1.170.560	
105	Rayon V	1 Orang	1.211.480	
	Lulusan Pendidikan Keahlian			
106	Rayon I	1 Orang	3.460.070	
107	Rayon II	1 Orang	3.573.600	
108	Rayon III	1 Orang	3.573.600	
109	Rayon IV	1 Orang	3.607.130	
110	Rayon V	1 Orang	3.790.660	
	Lulusan Dik Iptek			
111	Dik. Iptek S-1	1 Orang	3.363.020	
112	Dik. Iptek D-3 (Rayon I)	1 Orang	2.866.050	
113	Dik. Iptek D-3 (Rayon II)	1 Orang	2.929.440	
114	Dik. Iptek D-3 (Rayon III)	1 Orang	2.979.440	
115	Dik. Iptek D-3 (Rayon IV)	1 Orang	3.012.830	
116	Dik. Iptek D-3 (Rayon V)	1 Orang	3.196.220	
117	Dik. Iptek SMK (Rayon I)	1 Orang	2.798.230	
118	Dik. Iptek SMK (Rayon II)	1 Orang	2.861.480	
119	Dik. Iptek SMK (Rayon III)	1 Orang	2.911.480	
120	Dik. Iptek SMK (Rayon IV)	1 Orang	2.944.730	
121	Dik. Iptek SMK (Rayon V)	1 Orang	3.131.480	
	Peserta Dik Profesi dan Keahlian			
122	Rayon I	1 Orang	1.707.760	
123	Rayon II	1 Orang	1.722.640	
124	Rayon III	1 Orang	1.746.000	
125	Rayon IV	1 Orang	1.753.560	
126	Rayon V	1 Orang	1.766.400	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit			
127	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Laporan	7.964.000	
128	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Laporan	8.524.000	
129	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Laporan	8.924.000	
130	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Laporan	8.124.000	
131	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Laporan	19.724.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit			
128	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Laporan	1.972.000	
129	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Laporan	2.112.000	
130	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Laporan	2.212.000	
131	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Laporan	2.012.000	
132	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Laporan	4.912.000	
	Laporan Pengurusan Tahanan Sementara			
133	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Laporan	44.570	
134	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Laporan	45.640	
135	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Laporan	50.690	
136	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Laporan	45.590	
137	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Laporan	58.040	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
138	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Laporan	5.832.000	
139	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Laporan	6.252.000	
140	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Laporan	6.552.000	
141	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Laporan	5.952.000	
142	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Laporan	14.652.000	
143	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.216.000	
144	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.216.000	
145	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.626.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
146	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Laporan	11.856.000	
147	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Laporan	13.536.000	
148	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Laporan	14.736.000	
149	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Laporan	12.336.000	
150	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Laporan	47.136.000	
151	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.105.000	
152	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.150.000	
153	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.699.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
154	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	25.524.000	
155	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	29.374.000	
156	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	32.124.000	
157	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	26.624.000	
158	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	106.374.000	
159	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon I	1 Laporan	7.567.000	
160	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon II	1 Laporan	8.267.000	
161	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon III	1 Laporan	8.767.000	
162	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon IV	1 Laporan	7.767.000	
163	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon V	1 Laporan	22.267.000	
164	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	12.859.000	
165	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	14.109.000	
166	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	15.059.000	
167	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	13.759.000	
168	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	35.709.000	
169	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	10.774.000	
170	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	11.524.000	
171	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	12.074.000	
172	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	11.124.000	
173	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	25.674.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
174	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	23.667.000	
175	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	27.867.000	
176	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	30.867.000	
177	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	24.867.000	
178	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	111.867.000	
179	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	8.711.000	
180	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	10.461.000	
181	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	11.711.000	
182	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	9.211.000	
183	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	45.461.000	
184	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	13.243.000	
185	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	15.193.000	
186	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	16.643.000	
187	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	14.343.000	
188	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	50.793.000	
189	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	13.328.000	
190	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	16.128.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	191 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1	Laporan	18.128.000	
	192 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1	Laporan	14.128.000	
	193 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1	Laporan	72.128.000	
012.23	Markas Besar TNI AL				
	SBK Indeks Biaya Keluaran pada Keluaran (Output)				
	1 Calon Kadet	1	Orang	23.200.000	
	2 Calon Bintara Matra Laut	1	Orang	5.800.000	
	3 Calon Tamtama Matra Laut	1	Orang	4.200.000	
	4 Peserta Diklapa	1	Orang	3.554.720	
	5 Peserta Diktukpa	1	Orang	2.840.030	
	6 Peserta Diktukba	1	Orang	3.224.300	
	7 Peserta Dikspespa	1	Orang	2.494.460	
	8 Peserta Dikspesba	1	Orang	2.409.460	
	9 Peserta Penerbang TNI AL	1	Orang	3.948.225	
	SBK Indeks Biaya Keluaran pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Taktis TNI				
	10 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI	1	Orang	401.065	
	Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL				
	11 Latihan Matra Laut (Rayon I)	1	Orang	81.769	
	12 Latihan Matra Laut (Rayon II)	1	Orang	82.969	
	13 Latihan Matra Laut (Rayon III)	1	Orang	85.369	
	14 Latihan Matra Laut (Rayon IV)	1	Orang	87.769	
	15 Latihan Matra Laut (Rayon V)	1	Orang	93.769	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri				
	16 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1	Orang	1.260.347	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri				
	17 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1	Orang	111.333	
	Lulusan Dikma Serkad				
	18 Dikma Sertar Pria	1	Orang	7.271.100	
	19 Dikma Sertar Wanita	1	Orang	7.557.266	
	Lulusan Dikma Sermadakad				
	20 Dikma Sermadatar Pria	1	Orang	7.484.383	
	21 Dikma Sermadatar Wanita	1	Orang	7.779.466	
	Lulusan Dikma Sermatukad				
	22 Dikma Sermatukar Pria	1	Orang	8.328.300	
	23 Dikma Sermatukar Wanita	1	Orang	8.575.550	
	Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut				
	24 Diksargolan Perwira Pa PK Matra Laut	1	Orang	4.723.912	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut				
	25 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1	Orang	7.189.816	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut				
	26 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1	Orang	7.457.316	
	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut				
	27 Diksargolan Bintara Matra Laut	1	Orang	3.345.533	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Laut				
	28 Dikma Tamtama Matra Laut	1	Orang	7.041.413	
	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut				
	29 Diksargolan Tamtama Matra Laut	1	Orang	3.112.150	
	Lulusan Dik Seskoal				
	30 Dik. Seskoal	1	Orang	5.446.604	
	Lulusan Diklapa				
	31 Diklapa Matra Laut	1	Orang	3.669.408	
	Lulusan Diktukpa				
	32 Diktukpa Matra Laut	1	Orang	4.197.472	
	Lulusan Diktukba				
	33 Diktukba Matra Laut	1	Orang	3.986.588	
	Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS Sederajat Matra Laut				
	34 Dikbangsus Perwira Matra Laut	1	Orang	3.776.514	
	Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS Sederajat Matra Laut				
	35 Dikbangsus Bintara Matra Laut	1	Orang	3.250.760	
	Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut				
	36 Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1	Orang	3.029.966	
	Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut				
	37 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1	Orang	4.217.575	
	Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut				
	38 Diksus Penerbang Matra Laut	1	Orang	5.284.808	
	Lulusan Diksus Brevet Matra Laut				
	39 Diksus Brevet Matra Laut	1	Orang	4.528.040	
	Lulusan Dik Lainnya				
	40 Dik STTAL D-3	1	Orang	3.138.437	
	41 Dik STTAL S-1	1	Orang	3.449.930	
	42 Dik STTAL S-2	1	Orang	3.817.930	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Peserta Kursus Manajemen Strategik			
43	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.360.960	
44	Peserta Seskoal	1 Orang	4.586.620	
	Peserta STTAL			
45	Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.379.760	
46	Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.513.260	
	Peserta Dik Brevet			
47	Peserta Dik Brevet	1 Orang	3.948.250	
	Laporan Pembinaan Hukum			
48	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	44.814.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
49	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	5.832.000	
50	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.252.000	
51	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	6.552.000	
52	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	5.952.000	
53	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	14.652.000	
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.216.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.216.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.626.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	11.856.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	13.536.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	14.736.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	12.336.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	47.136.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.105.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.150.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.699.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	25.524.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	29.374.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	32.124.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	26.624.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	106.374.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	7.567.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	8.267.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	8.767.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	7.767.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	22.267.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	12.859.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	14.109.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	15.059.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	13.759.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	35.709.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	10.774.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	11.524.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	12.074.000	

6 Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	11.124.000	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	25.674.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	23.667.000	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	27.867.000	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	30.867.000	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	24.867.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	111.867.000	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.711.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	10.461.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	11.711.000	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	9.211.000	
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	45.461.000	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.243.000	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	15.193.000	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	16.643.000	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.343.000	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	50.793.000	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	13.328.000	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	16.128.000	
	102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	18.128.000	
	103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	14.128.000	
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	72.128.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit			
	105 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Laporan	7.964.000	
	106 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Laporan	8.524.000	
	107 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Laporan	8.924.000	
	108 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Laporan	8.124.000	
	109 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Laporan	19.724.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit			
	110 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Laporan	1.972.000	
	111 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Laporan	2.112.000	
	112 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Laporan	2.212.000	
	113 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Laporan	2.012.000	
	114 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Laporan	4.912.000	
	Pengurusan Tahanan Sementara			
	115 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Laporan	44.570	
	116 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Laporan	45.640	
	117 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Laporan	50.690	
	118 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Laporan	45.590	
	119 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Laporan	58.040	
012.24	Markas Besar TNI AU			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Operasi Bhakti TNI	1 Frekuensi	94.541	
	2 Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	313.427	
	3 Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	77.807	
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	6.600.812	
	5 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	152.277	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peserta Sesko Matra Udara			
	6 Seleksi Seskoau dan Susstaf Matra Udara	1 Orang	2.316.500	
	Peserta Sekkau			
	7 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.591.500	
	Peserta Setukpa			
	8 Seleksi Setukpa Matra udara	1 Orang	1.439.000	
	Peserta Setukba			
	9 Seleksi Setukba Matra Udara	1 Orang	1.240.020	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	
	Lulusan Dikma Sertar				
10	Pendidikan Sertar Pria	1	Orang	6.643.509	
11	Pendidikan Sertar Wanita	1	Orang	6.796.775	
	Lulusan Dikma Sermadatar				
12	Pendidikan Sermadatar Pria	1	Orang	6.898.856	
13	Pendidikan Sermadatar Wanita	1	Orang	7.052.795	
	Lulusan Dikma Sermatutar				
14	Pendidikan Sermatutar Pria	1	Orang	7.830.531	
15	Pendidikan Sermatutar Wanita	1	Orang	7.983.573	
	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara				
16	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1	Orang	5.126.310	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara				
17	Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1	Orang	4.560.030	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara				
18	Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1	Orang	4.730.030	
	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara				
19	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1	Orang	3.047.608	
20	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1	Orang	3.047.608	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Udara				
21	Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1	Orang	4.356.760	
	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara				
22	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1	Orang	2.776.575	
	Lulusan Dikma Sekbang/Seknav				
23	Pendidikan Pertama Sekbang/Seknav	1	Orang	9.063.958	
	Lulusan Dikma SIN/SIP				
24	Pendidikan SIP/SIN	1	Orang	11.484.705	
	Lulusan Seskoau				
25	Pendidikan Seskoau	1	Orang	4.786.872	
26	Pendidikan Susstaf	1	Orang	4.673.800	
	Lulusan Sekkau				
27	Pendidikan Sekkau	1	Orang	3.695.883	
28	Pendidikan Suspajemen	1	Orang	3.652.280	
	Lulusan Setukpa				
29	Pendidikan Setukpa	1	Orang	3.470.703	
	Lulusan Setukba				
30	Pendidikan Setukba	1	Orang	3.137.245	
	Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara				
31	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1	Orang	3.470.875	
	Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara				
32	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1	Orang	2.853.975	
	Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara				
33	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1	Orang	2.753.100	
	Peserta Dikbangspes Perwira				
34	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1	Orang	736.680	
	Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama				
35	Seleksi Dikbangspes Bintara/Tamtama Matra Udara	1	Orang	633.980	
	Calon Karbol				
36	Werving Taruna/Taruni	1	Orang	23.200.120	
	Calon Bintara Matra Udara				
37	Werving Bintara Matra Udara	1	Orang	5.800.100	
	Calon Tamtama Matra Udara				
38	Werving Tamtama Matra Udara	1	Orang	4.200.011	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit				
39	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1	Laporan	7.964.000	
40	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1	Laporan	8.524.000	
41	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1	Laporan	8.924.000	
42	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1	Laporan	8.124.000	
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1	Laporan	19.724.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit				
44	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1	Laporan	1.972.000	
45	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1	Laporan	2.112.000	
46	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1	Laporan	2.212.000	
47	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1	Laporan	2.012.000	
48	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1	Laporan	4.912.000	
	Pengurusan Tahanan Sementara				
49	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1	Laporan	44.570	
50	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1	Laporan	45.640	
51	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1	Laporan	50.690	
52	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1	Laporan	45.590	
53	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1	Laporan	58.040	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer				
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1	Laporan	5.832.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1	Laporan	6.252.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1	Laporan	6.552.000	
	57 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1	Laporan	5.952.000	
	58 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1	Laporan	14.652.000	
	59 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara pidana militer Tk. Banding	1	Laporan	2.216.000	
	60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1	Laporan	2.216.000	
	61 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1	Laporan	2.626.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum				
	62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1	Laporan	11.856.000	
	63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1	Laporan	13.536.000	
	64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1	Laporan	14.736.000	
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1	Laporan	12.336.000	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1	Laporan	47.136.000	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1	Laporan	4.105.000	
	68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1	Laporan	3.150.000	
	69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1	Laporan	5.699.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat				
	70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1	Laporan	25.524.000	
	71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1	Laporan	29.374.000	
	72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1	Laporan	32.124.000	
	73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1	Laporan	26.624.000	
	74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1	Laporan	106.374.000	
	75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1	Laporan	7.567.000	
	76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1	Laporan	8.267.000	
	77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1	Laporan	8.767.000	
	78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1	Laporan	7.767.000	
	79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1	Laporan	22.267.000	
	80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1	Laporan	12.859.000	
	81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1	Laporan	14.109.000	
	82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1	Laporan	15.059.000	
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1	Laporan	13.759.000	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1	Laporan	35.709.000	
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1	Laporan	10.774.000	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1	Laporan	11.524.000	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1	Laporan	12.074.000	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1	Laporan	11.124.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1	Laporan	25.674.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat				
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1	Laporan	23.667.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1	Laporan	27.867.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1	Laporan	30.867.000	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1	Laporan	24.867.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	111.867.000	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.711.000	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	10.461.000	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	11.711.000	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	9.211.000	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	45.461.000	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.243.000	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	15.193.000	
	102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	16.643.000	
	103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.343.000	
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	50.793.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	13.328.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	16.128.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	18.128.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	14.128.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	72.128.000	

h An

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
013.05	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Pembinaan UPT Pemasyarakatan				
	1 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Aceh	27	UPT	711.590.000	
	2 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Utara	40	UPT	970.538.000	
	3 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Barat	25	UPT	638.350.000	
	4 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Riau	19	UPT	629.316.000	
	5 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah kepulauan Riau	10	UPT	546.770.000	
	6 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jambi	13	UPT	632.418.000	
	7 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu	8	UPT	510.268.000	
	8 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan	24	UPT	680.862.000	
	9 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Lampung	21	UPT	566.090.000	
	10 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Bangka Belitung	7	UPT	460.368.000	
	11 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta	17	UPT	279.556.000	
	12 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Banten	13	UPT	580.755.000	
	13 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat	38	UPT	758.806.000	
	14 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah	58	UPT	911.750.000	
	15 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur	51	UPT	973.156.000	
	16 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta	13	UPT	701.211.000	
	17 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Bali	13	UPT	814.345.000	
	18 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Barat	17	UPT	626.600.000	
	19 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Selatan	16	UPT	646.942.000	
	20 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Tengah	13	UPT	669.852.000	
	21 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Timur	14	UPT	788.808.000	
	22 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Maluku	15	UPT	1.017.680.000	
	23 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Maluku Utara	10	UPT	748.702.000	
	24 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Gorontalo	5	UPT	502.216.000	
	25 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur	21	UPT	663.283.000	
	26 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Papua	12	UPT	986.182.000	
	27 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Papua Barat	9	UPT	890.544.000	
	28 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Tenggara	9	UPT	502.404.000	
	29 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Selatan	28	UPT	700.680.000	
	30 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Utara	15	UPT	661.530.000	
	31 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Tengah	13	UPT	716.207.000	
	32 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Barat	6	UPT	423.390.000	
	33 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Barat	12	UPT	496.626.000	
	Layanan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan Kegiatan Kerja				
	34 Pembinaan Kemandirian Narapidana	20	Napi dan klien	38.300.000	
	Layanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak				
	35 Pelatihan Keterampilan Anak	30	Napi Anak	46.100.000	

AGV

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Tindak Lanjut Mou			
	36 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Mou Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik	1 Dokumen	38.868.000	
	37 Rekomendasi Pengakuan Kode Etik	1 Dokumen/Laporan	5.880.000	
	Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen			
	38 Penyelidikan Pengaduan Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	1 UPT	10.824.000	
	39 Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh Bapas Layanan Pendidikan, Perlindungan Dan Pengentasan Anak	1 Klien PAS	2.495.000	
	40 Pendampingan Peradilan Anak	1 Napi Anak	2.045.000	
013.06	Direktorat Jenderal Imigrasi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Operasi Intelijen Keimigrasian			
	1 Operasi Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi Penyidikan Keimigrasian	1 LHK	65.466.000	
	2 Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	1 LHK	150.119.000	
	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian			
	3 Pendeportasian Oleh Ditjen Imigrasi Pengawasan Keimigrasian	1 Orang	4.912.000	
	4 Pengawasan Orang Asing Dan WNI Pengawasan Keimigrasian	1 LHK	65.466.000	
	5 Operasi Intelijen Keimigrasian di Aceh	1 LHK	34.740.000	
	6 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	33.740.000	
	7 Operasi Intelijen Keimigrasian di Riau	1 LHK	33.000.000	
	8 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kepulauan Riau	1 LHK	30.060.000	
	9 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jambi	1 LHK	31.810.000	
	10 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	30.570.000	
	11 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	33.050.000	
	12 Operasi Intelijen Keimigrasian di Lampung	1 LHK	30.570.000	
	13 Operasi Intelijen Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	32.530.000	
	14 Operasi Intelijen Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	30.770.000	
	15 Operasi Intelijen Keimigrasian di Banten	1 LHK	31.260.000	
	16 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	32.070.000	
	17 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	36.340.000	
	18 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	30.560.000	
	19 Operasi Intelijen Keimigrasian di Yogyakarta	1 LHK	31.570.000	
	20 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Timur	1 LHK	31.865.000	
	21 Operasi Intelijen Keimigrasian di Bali	1 LHK	33.960.000	
	22 Operasi Intelijen Keimigrasian di NTB	1 LHK	31.250.000	
	23 Operasi Intelijen Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur	1 LHK	32.860.000	
	24 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Barat	1 LHK	36.620.000	
	25 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1 LHK	36.445.000	
	26 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1 LHK	31.650.000	
	27 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Timur	1 LHK	60.030.000	
	28 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Utara	1 LHK	58.930.000	
	29 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Utara	1 LHK	31.820.000	
	30 Operasi Intelijen Keimigrasian di Gorontalo	1 LHK	38.685.000	
	31 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Barat	1 LHK	32.670.000	
	32 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1 LHK	34.070.000	
	33 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1 LHK	35.540.000	
	34 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1 LHK	34.405.000	
	35 Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku	1 LHK	41.085.000	
	36 Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku Utara	1 LHK	51.530.000	
	37 Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua	1 LHK	81.640.000	
	38 Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua Barat	1 LHK	80.690.000	
	39 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Aceh	1 LHK	34.740.000	
	40 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	33.740.000	
	41 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Riau	1 LHK	33.000.000	
	42 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kepulauan Riau	1 LHK	29.960.000	
	43 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jambi	1 LHK	31.810.000	
	44 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	30.570.000	
	45 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	33.050.000	
	46 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Lampung	1 LHK	30.570.000	
	47 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	32.530.000	
	48 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	30.770.000	
	49 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Banten	1 LHK	31.260.000	
	50 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	32.070.000	
	51 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	36.340.000	
	52 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	30.560.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
53	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Yogyakarta	1	LHK	31.570.000	
54	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Timur	1	LHK	31.805.000	
55	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bali	1	LHK	33.960.000	
56	Operasi Pemantauan Keimigrasian di NTB	1	LHK	31.250.000	
57	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur	1	LHK	32.860.000	
58	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Barat	1	LHK	36.620.000	
59	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1	LHK	36.445.000	
60	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1	LHK	31.650.000	
61	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Timur	1	LHK	60.030.000	
62	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Utara	1	LHK	58.930.000	
63	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Utara	1	LHK	31.820.000	
64	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Gorontalo	1	LHK	38.685.000	
65	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Barat	1	LHK	32.670.000	
66	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1	LHK	35.540.000	
67	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1	LHK	34.405.000	
68	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku	1	LHK	41.085.000	
69	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku Utara	1	LHK	51.530.000	
70	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua	1	LHK	81.640.000	
71	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua Barat	1	LHK	80.690.000	
72	Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1	LHK	34.070.000	
73	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Aceh	1	LHK	68.112.000	
74	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Utara	1	LHK	66.800.000	
75	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Riau	1	LHK	64.980.000	
76	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kepulauan Riau	1	LHK	60.426.000	
77	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jambi	1	LHK	63.040.000	
78	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Barat	1	LHK	60.930.000	
79	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Selatan	1	LHK	66.920.000	
80	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Lampung	1	LHK	59.958.000	
81	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bengkulu	1	LHK	64.954.000	
82	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bangka Belitung	1	LHK	61.460.000	
83	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Banten	1	LHK	63.396.000	
84	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Barat	1	LHK	65.940.000	
85	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jakarta	1	LHK	78.184.000	
86	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Tengah	1	LHK	60.380.000	
87	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Yogyakarta	1	LHK	72.376.000	
88	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Timur	1	LHK	64.691.000	
89	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bali	1	LHK	74.160.000	
90	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di NTB	1	LHK	65.390.000	
91	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur	1	LHK	67.330.000	
92	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Barat	1	LHK	72.596.000	
93	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1	LHK	72.343.000	
94	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1	LHK	63.150.000	
95	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Timur	1	LHK	119.946.000	
96	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Utara	1	LHK	116.650.000	
97	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Utara	1	LHK	63.200.000	
98	Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Gorontalo	1	LHK	75.963.000	

ASW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	99 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Barat	1	LHK	64.872.000	
	100 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1	LHK	69.800.000	
	101 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1	LHK	71.216.000	
	102 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1	LHK	68.431.000	
	103 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku	1	LHK	76.909.000	
	104 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku Utara	1	LHK	101.810.000	
	105 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua	1	LHK	165.160.000	
	106 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua Barat	1	LHK	160.010.000	
	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian				
	107 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Aceh	1	Orang	22.992.000	
	108 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Utara	1	Orang	21.662.000	
	109 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Riau	1	Orang	19.137.000	
	110 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kepulauan Riau	1	Orang	8.500.000	
	111 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jambi	1	Orang	12.112.000	
	112 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Barat	1	Orang	18.929.000	
	113 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Selatan	1	Orang	17.666.000	
	114 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bengkulu	1	Orang	14.942.000	
	115 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Lampung	1	Orang	15.746.000	
	116 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bangka Belitung	1	Orang	17.965.000	
	117 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Banten	1	Orang	15.684.000	
	118 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Barat	1	Orang	16.631.000	
	119 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jakarta	1	Orang	16.058.000	
	120 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Tengah	1	Orang	16.716.000	
	121 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Yogyakarta	1	Orang	17.264.000	
	122 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Timur	1	Orang	18.557.000	
	123 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bali	1	Orang	20.176.000	
	124 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di NTB	1	Orang	19.783.000	
	125 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di NTT	1	Orang	27.639.000	
	126 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Barat	1	Orang	19.516.000	
	127 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Tengah	1	Orang	19.822.000	
	128 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Selatan	1	Orang	19.269.000	
	129 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Timur	1	Orang	26.354.000	
	130 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Utara	1	Orang	24.920.000	
	131 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Utara	1	Orang	23.821.000	
	132 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Gorontalo	1	Orang	22.588.000	
	133 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Barat	1	Orang	23.458.000	
	134 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Selatan	1	Orang	21.456.000	
	135 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tengah	1	Orang	18.438.000	
	136 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tenggara	1	Orang	22.344.000	
	137 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku	1	Orang	26.721.000	
	138 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku Utara	1	Orang	29.951.000	
	139 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Papua	1	Orang	42.025.000	
	140 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Papua Barat	1	Orang	34.882.000	
	141 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Riau	1	Orang	19.137.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	142 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jakarta	1	Orang	16.058.000	
	143 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Tengah	1	Orang	16.716.000	
	144 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Timur	1	Orang	18.557.000	
	145 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Bali	1	Orang	20.176.000	
	146 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di NTT	1	Orang	27.639.000	
	147 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Barat	1	Orang	19.516.000	
	148 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Timur	1	Orang	26.354.000	
	149 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Utara	1	Orang	23.821.000	
	150 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Selatan	1	Orang	21.456.000	
	151 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Papua	1	Orang	42.025.000	
	152 Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sumatera Utara	1	Orang	21.662.000	
	153 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Aceh	1	Orang	20.284.000	
	154 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Utara	1	Orang	18.794.000	
	155 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Riau	1	Orang	16.082.000	
	156 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kepri	1	Orang	15.372.000	
	157 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jambi	1	Orang	14.664.000	
	158 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Barat	1	Orang	15.846.000	
	159 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Selatan	1	Orang	14.398.000	
	160 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Lampung	1	Orang	12.315.000	
	161 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bengkulu	1	Orang	15.086.000	
	162 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bangka Belitung	1	Orang	13.433.000	
	163 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Banten	1	Orang	6.292.000	
	164 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Barat	1	Orang	7.061.000	
	165 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jakarta	1	Orang	4.912.000	
	166 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Tengah	1	Orang	13.421.000	
	167 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Yogyakarta	1	Orang	13.996.000	
	168 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Timur	1	Orang	15.394.000	
	169 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bali	1	Orang	17.173.000	
	170 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Nusa Tenggara Barat	1	Orang	16.753.000	
	171 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Nusa Tenggara Timur	1	Orang	21.258.000	
	172 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Barat	1	Orang	16.380.000	
	173 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Tengah	1	Orang	16.739.000	
	174 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Selatan	1	Orang	15.913.000	
	175 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Timur	1	Orang	23.486.000	
	176 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Utara	1	Orang	27.004.000	
	177 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Utara	1	Orang	21.273.000	
	178 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Gorontalo	1	Orang	22.185.000	
	179 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Barat	1	Orang	21.407.000	
	180 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Selatan	1	Orang	18.588.000	
	181 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tengah	1	Orang	21.842.000	
	182 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tenggara	1	Orang	18.893.000	
	183 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku	1	Orang	27.975.000	
	184 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku Utara	1	Orang	29.438.000	
	185 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Papua	1	Orang	40.252.000	
	186 Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Papua Barat	1	Orang	45.664.000	
	187 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sumatera Utara	1	Orang	18.794.000	
	188 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Riau	1	Orang	16.082.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	189 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kepulauan Riau	1	Orang	15.372.000	
	190 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jakarta	1	Orang	4.912.000	
	191 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Tengah	1	Orang	13.421.000	
	192 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Timur	1	Orang	15.394.000	
	193 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Bali	1	Orang	17.173.000	
	194 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Nusa Tenggara Timur	1	Orang	21.258.000	
	195 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Barat	1	Orang	16.380.000	
	196 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Timur	1	Orang	23.486.000	
	197 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Utara	1	Orang	21.273.000	
	198 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Selatan	1	Orang	18.588.000	
	199 Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Papua	1	Orang	40.252.000	
	Penyidikan Keimigrasian				
	200 Penyidikan Keimigrasian di Aceh	1	LHK	113.474.000	
	201 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Utara	1	LHK	110.042.000	
	202 Penyidikan Keimigrasian di Riau	1	LHK	107.400.000	
	203 Penyidikan Keimigrasian di Kepri	1	LHK	95.419.000	
	204 Penyidikan Keimigrasian di Jambi	1	LHK	102.603.000	
	205 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Barat	1	LHK	98.146.000	
	206 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Selatan	1	LHK	106.102.000	
	207 Penyidikan Keimigrasian di Lampung	1	LHK	98.530.000	
	208 Penyidikan Keimigrasian di Bengkulu	1	LHK	105.098.000	
	209 Penyidikan Keimigrasian di Bangka Belitung	1	LHK	99.476.000	
	210 Penyidikan Keimigrasian di Banten	1	LHK	99.964.000	
	211 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Barat	1	LHK	103.361.000	
	212 Penyidikan Keimigrasian di Jakarta	1	LHK	118.691.000	
	213 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Tengah	1	LHK	98.223.000	
	214 Penyidikan Keimigrasian di Yogyakarta	1	LHK	99.104.000	
	215 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Timur	1	LHK	102.573.000	
	216 Penyidikan Keimigrasian di Bali	1	LHK	107.488.000	
	217 Penyidikan Keimigrasian di NTB	1	LHK	99.855.000	
	218 Penyidikan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur	1	LHK	106.163.000	
	219 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Barat	1	LHK	120.262.000	
	220 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1	LHK	118.609.000	
	221 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1	LHK	102.035.000	
	222 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Timur	1	LHK	207.050.000	
	223 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Utara	1	LHK	202.944.000	
	224 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Utara	1	LHK	102.696.000	
	225 Penyidikan Keimigrasian di Gorontalo	1	LHK	123.501.000	
	226 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Barat	1	LHK	107.023.000	
	227 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1	LHK	110.836.000	
	228 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1	LHK	115.413.000	
	229 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1	LHK	111.975.000	
	230 Penyidikan Keimigrasian di Maluku	1	LHK	126.602.000	
	231 Penyidikan Keimigrasian di Maluku Utara	1	LHK	177.289.000	
	232 Penyidikan Keimigrasian di Papua	1	LHK	292.812.000	
	233 Penyidikan Keimigrasian di Papua Barat	1	LHK	284.112.000	
013.08	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan				
	SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di DPR RI				
	1 Pembahasan RUU Dan Penyusunan DIM	1	RUU	622.075.000	
	Rancangan Peraturan Presiden Dan Rancangan Peraturan Menteri				
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	1	Rperpres & Rpermen	200.904.000	
013.09	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia				
	SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Pembangunan HAM di Wilayah				
	1 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil DKI Jakarta	1	Laporan	34.340.000	
	2 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Barat	1	Laporan	33.370.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	3 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Jawa Tengah	1	Laporan	31.400.000	
	4 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Timur	1	Laporan	33.170.000	
	5 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Utara	1	Laporan	32.620.000	
	6 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sulawesi Selatan	1	Laporan	34.160.000	
	7 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Aceh	1	Laporan	33.400.000	
	8 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Barat	1	Laporan	32.790.000	
	9 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Riau	1	Laporan	31.800.000	
	10 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Selatan	1	Laporan	33.380.000	
	11 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Lampung	1	Laporan	32.750.000	
	12 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Barat	1	Laporan	32.390.000	
	13 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kalimantan Selatan	1	Laporan	32.800.000	
	14 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Kalimantan Timur	1	Laporan	33.150.000	
	15 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Utara	1	Laporan	33.740.000	
	16 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bali	1	Laporan	32.980.000	
	17 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil NTT	1	Laporan	33.140.000	
	18 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Maluku	1	Laporan	33.960.000	
	19 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Papua	1	Laporan	38.840.000	
	20 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil	1	Laporan	31.980.000	
	21 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Yogyakarta	1	Laporan	30.810.000	
	22 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bengkulu	1	Laporan	32.790.000	
	23 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Palangkaraya	1	Laporan	31.800.000	
	24 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Tenggara	1	Laporan	33.150.000	
	25 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Palu	1	Laporan	32.380.000	
	26 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil NTB	1	Laporan	32.380.000	
	27 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Banten	1	Laporan	34.160.000	
	28 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bangka Belitung	1	Laporan	32.370.000	
	29 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Gorontalo	1	Laporan	32.410.000	
	30 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Maluku Utara	1	Laporan	37.920.000	
	31 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Papua Barat	1	Laporan	38.100.000	
	32 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kepri	1	Laporan	33.900.000	
	33 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Barat	1	Laporan	34.150.000	
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional				
	SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi				
	1 Perkara Hukum Pidana DKI Jakarta	1	Orang	13.520.000	
	2 Perkara Hukum Perdata DKI Jakarta	1	Orang	12.810.000	
	3 Perkara Hukum Tata Usaha Negara DKI Jakarta	1	Orang	12.810.000	
	4 Perkara Hukum Pidana Jawa Barat	1	Orang	13.928.000	
	5 Perkara Hukum Perdata Jawa Barat	1	Orang	13.184.000	
	6 Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Barat	1	Orang	13.184.000	
	7 Perkara Hukum Pidana Jawa Tengah	1	Orang	13.400.000	
	8 Perkara Hukum Perdata Jawa Tengah	1	Orang	12.700.000	
	9 Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Tengah	1	Orang	12.700.000	
	10 Perkara Hukum Pidana Jawa Timur	1	Orang	13.400.000	
	11 Perkara Hukum Perdata Jawa Timur	1	Orang	12.700.000	
	12 Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Timur	1	Orang	12.700.000	
	13 Perkara Hukum Pidana Sumatera Utara	1	Orang	15.656.000	
	14 Perkara Hukum Perdata Sumatera Utara	1	Orang	14.768.000	
	15 Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Utara	1	Orang	14.768.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
16	Perkara Hukum Pidana Sulawesi Selatan	1	Orang	13.400.000	
17	Perkara Hukum Perdata Sulawesi Selatan	1	Orang	12.700.000	
18	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan	1	Orang	12.700.000	
19	Perkara Hukum Pidana Aceh	1	Orang	14.540.000	
20	Perkara Hukum Perdata Aceh	1	Orang	13.745.000	
21	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Aceh	1	Orang	13.745.000	
22	Perkara Hukum Pidana Sumatera Barat	1	Orang	13.400.000	
23	Perkara Hukum Perdata Sumatera Barat	1	Orang	12.700.000	
24	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Barat	1	Orang	12.700.000	
25	Perkara Hukum Pidana Riau	1	Orang	15.500.000	
26	Perkara Hukum Perdata Riau	1	Orang	14.625.000	
27	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Riau	1	Orang	14.625.000	
28	Perkara Hukum Pidana Sumatera Selatan	1	Orang	15.500.000	
29	Perkara Hukum Perdata Sumatera Selatan	1	Orang	14.625.000	
30	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Selatan	1	Orang	14.625.000	
31	Perkara Hukum Pidana Lampung	1	Orang	13.400.000	
32	Perkara Hukum Perdata Lampung	1	Orang	12.700.000	
33	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Lampung	1	Orang	12.700.000	
34	Perkara Hukum Pidana Kalimantan Barat	1	Orang	14.576.000	
35	Perkara Hukum Perdata Kalimantan Barat	1	Orang	13.778.000	
36	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Barat	1	Orang	13.778.000	
37	Perkara Hukum Pidana Kalimantan Selatan	1	Orang	13.520.000	
38	Perkara Hukum Perdata Kalimantan Selatan	1	Orang	12.810.000	
39	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Selatan	1	Orang	12.810.000	
40	Perkara Hukum Pidana Kalimantan Timur	1	Orang	17.156.000	
41	Perkara Hukum Perdata Kalimantan Timur	1	Orang	16.143.000	
42	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Timur	1	Orang	16.143.000	
43	Perkara Hukum Pidana Sulawesi Utara	1	Orang	14.600.000	
44	Perkara Hukum Perdata Sulawesi Utara	1	Orang	13.800.000	
45	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Utara	1	Orang	13.800.000	
46	Perkara Hukum Pidana Bali	1	Orang	14.480.000	
47	Perkara Hukum Perdata Bali	1	Orang	13.690.000	
48	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bali	1	Orang	13.690.000	
49	Perkara Hukum Pidana Nusa Tenggara Timur	1	Orang	14.600.000	
50	Perkara Hukum Perdata Nusa Tenggara Timur	1	Orang	13.800.000	
51	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Timur	1	Orang	13.800.000	
52	Perkara Hukum Pidana Maluku	1	Orang	15.680.000	
53	Perkara Hukum Perdata Maluku	1	Orang	14.790.000	
54	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Maluku	1	Orang	14.790.000	
55	Perkara Hukum Pidana Papua	1	Orang	17.300.000	
56	Perkara Hukum Perdata Papua	1	Orang	16.275.000	
57	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Papua	1	Orang	16.275.000	
58	Perkara Hukum Pidana Jambi	1	Orang	13.520.000	
59	Perkara Hukum Perdata Jambi	1	Orang	12.810.000	
60	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jambi	1	Orang	12.810.000	
61	Perkara Hukum Pidana Bengkulu	1	Orang	13.520.000	
62	Perkara Hukum Perdata Bengkulu	1	Orang	12.810.000	
63	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bengkulu	1	Orang	12.810.000	
64	Perkara Hukum Pidana Di Yogyakarta	1	Orang	14.588.000	
65	Perkara Hukum Perdata Di Yogyakarta	1	Orang	13.789.000	
66	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Di Yogyakarta	1	Orang	13.789.000	
67	Perkara Hukum Pidana Kalimantan Tengah	1	Orang	16.328.000	
68	Perkara Hukum Perdata Kalimantan Tengah	1	Orang	15.384.000	
69	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Tengah	1	Orang	15.384.000	
70	Perkara Hukum Pidana Sulawesi Tenggara	1	Orang	14.240.000	
71	Perkara Hukum Perdata Sulawesi Tenggara	1	Orang	13.470.000	
72	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi	1	Orang	13.470.000	
73	Perkara Hukum Pidana Sulawesi Tengah	1	Orang	14.240.000	
74	Perkara Hukum Perdata Sulawesi Tengah	1	Orang	13.470.000	
75	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah	1	Orang	13.470.000	
76	Perkara Hukum Pidana Nusa Tenggara Barat	1	Orang	14.480.000	
77	Perkara Hukum Perdata Nusa Tenggara Barat	1	Orang	13.690.000	
78	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Barat	1	Orang	13.690.000	
79	Perkara Hukum Pidana Banten	1	Orang	13.400.000	
80	Perkara Hukum Perdata Banten	1	Orang	12.700.000	
81	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Banten	1	Orang	12.700.000	
82	Perkara Hukum Pidana Bangka Belitung	1	Orang	16.124.000	
83	Perkara Hukum Perdata Bangka Belitung	1	Orang	15.197.000	
84	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bangka Belitung	1	Orang	15.197.000	
85	Perkara Hukum Pidana Gorontalo	1	Orang	13.880.000	
86	Perkara Hukum Perdata Gorontalo	1	Orang	13.140.000	
87	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Gorontalo	1	Orang	13.140.000	
88	Perkara Hukum Pidana Maluku Utara	1	Orang	15.800.000	
89	Perkara Hukum Perdata Maluku Utara	1	Orang	14.900.000	
90	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Maluku Utara	1	Orang	14.900.000	
91	Perkara Hukum Pidana Papua Barat	1	Orang	16.760.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
92	Perkara Hukum Perdata Papua Barat	1	Orang	15.780.000	
93	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Papua Barat	1	Orang	15.780.000	
94	Perkara Hukum Pidana Kepulauan Riau	1	Orang	14.840.000	
95	Perkara Hukum Perdata Kepulauan Riau	1	Orang	14.020.000	
96	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kepulauan Riau	1	Orang	14.020.000	
97	Perkara Hukum Pidana Sulawesi Barat	1	Orang	13.520.000	
98	Perkara Hukum Perdata Sulawesi Barat	1	Orang	12.810.000	
99	Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Barat	1	Orang	12.810.000	
	2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi				
100	Penyuluhan Hukum DKI Jakarta	1	Kegiatan	4.840.000	
101	Konsultasi Hukum DKI Jakarta	1	Kegiatan	1.050.000	
102	Investigasi Perkara DKI Jakarta	1	Kegiatan	600.000	
103	Penelitian Hukum DKI Jakarta	1	Kegiatan	2.500.000	
104	Mediasi DKI Jakarta	1	Kegiatan	1.050.000	
105	Negosiasi DKI Jakarta	1	Kegiatan	1.050.000	
106	Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta	1	Kegiatan	4.160.000	
107	Pendampingan Di Luar Pengadilan DKI Jakarta	1	Kegiatan	2.900.000	
108	Drafting Dokumen Hukum DKI Jakarta	1	Kegiatan	500.000	
109	Penyuluhan Hukum Jawa Barat	1	Kegiatan	4.690.000	
110	Konsultasi Hukum Jawa Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
111	Investigasi Perkara Jawa Barat	1	Kegiatan	600.000	
112	Penelitian Hukum Jawa Barat	1	Kegiatan	2.500.000	
113	Mediasi Jawa Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
114	Negosiasi Jawa Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
115	Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat	1	Kegiatan	4.060.000	
116	Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Barat	1	Kegiatan	2.900.000	
117	Drafting Dokumen Hukum Jawa Barat	1	Kegiatan	500.000	
118	Penyuluhan Hukum Jawa Tengah	1	Kegiatan	4.390.000	
119	Konsultasi Hukum Jawa Tengah	1	Kegiatan	1.050.000	
120	Investigasi Perkara Jawa Tengah	1	Kegiatan	600.000	
121	Penelitian Hukum Jawa Tengah	1	Kegiatan	2.500.000	
122	Mediasi Jawa Tengah	1	Kegiatan	1.050.000	
123	Negosiasi Jawa Tengah	1	Kegiatan	1.050.000	
124	Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah	1	Kegiatan	3.860.000	
125	Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Tengah	1	Kegiatan	2.900.000	
126	Drafting Dokumen Hukum Jawa Tengah	1	Kegiatan	500.000	
127	Penyuluhan Hukum Jawa Timur	1	Kegiatan	4.660.000	
128	Konsultasi Hukum Jawa Timur	1	Kegiatan	1.050.000	
129	Investigasi Perkara Jawa Timur	1	Kegiatan	600.000	
130	Penelitian Hukum Jawa Timur	1	Kegiatan	2.500.000	
131	Mediasi Jawa Timur	1	Kegiatan	1.050.000	
132	Negosiasi Jawa Timur	1	Kegiatan	1.050.000	
133	Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur	1	Kegiatan	4.040.000	
134	Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Timur	1	Kegiatan	2.900.000	
135	Drafting Dokumen Hukum Jawa Timur	1	Kegiatan	500.000	
136	Penyuluhan Hukum Sumatera Utara	1	Kegiatan	4.570.000	
137	Konsultasi Hukum Sumatera Utara	1	Kegiatan	1.050.000	
138	Investigasi Perkara Sumatera Utara	1	Kegiatan	600.000	
139	Penelitian Hukum Sumatera Utara	1	Kegiatan	2.500.000	
140	Mediasi Sumatera Utara	1	Kegiatan	1.050.000	
141	Negosiasi Sumatera Utara	1	Kegiatan	1.050.000	
142	Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Utara	1	Kegiatan	3.980.000	
143	Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Utara	1	Kegiatan	2.900.000	
144	Drafting Dokumen Hukum Sumatera Utara	1	Kegiatan	500.000	
145	Penyuluhan Hukum Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	4.810.000	
146	Konsultasi Hukum Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	1.050.000	
147	Investigasi Perkara Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	600.000	
148	Penelitian Hukum Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	2.500.000	
149	Mediasi Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	1.050.000	
150	Negosiasi Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	1.050.000	
151	Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	4.140.000	
152	Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	2.900.000	
153	Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Selatan	1	Kegiatan	500.000	
154	Penyuluhan Hukum Aceh	1	Kegiatan	4.690.000	
155	Konsultasi Hukum Aceh	1	Kegiatan	1.050.000	
156	Investigasi Perkara Aceh	1	Kegiatan	600.000	
157	Penelitian Hukum Aceh	1	Kegiatan	2.500.000	
158	Mediasi Aceh	1	Kegiatan	1.050.000	
159	Negosiasi Aceh	1	Kegiatan	1.050.000	
160	Pemberdayaan Masyarakat Aceh	1	Kegiatan	4.060.000	
161	Pendampingan Di Luar Pengadilan Aceh	1	Kegiatan	2.900.000	
162	Drafting Dokumen Hukum Aceh	1	Kegiatan	500.000	
163	Penyuluhan Hukum Sumatera Barat	1	Kegiatan	4.600.000	
164	Konsultasi Hukum Sumatera Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
165	Investigasi Perkara Sumatera Barat	1	Kegiatan	600.000	
166	Penelitian Hukum Sumatera Barat	1	Kegiatan	2.500.000	
167	Mediasi Sumatera Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
168	Negosiasi Sumatera Barat	1	Kegiatan	1.050.000	
169	Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat	1	Kegiatan	4.000.000	
170	Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Barat	1	Kegiatan	2.900.000	
171	Drafting Dokumen Hukum Sumatera Barat	1	Kegiatan	500.000	
172	Penyuluhan Hukum Riau	1	Kegiatan	4.450.000	
173	Konsultasi Hukum Riau	1	Kegiatan	1.050.000	
174	Investigasi Perkara Riau	1	Kegiatan	600.000	

600

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	175 Penelitian Hukum Riau	1 Kegiatan	2.500.000	
	176 Mediasi Riau	1 Kegiatan	1.050.000	
	177 Negosiasi Riau	1 Kegiatan	1.050.000	
	178 Pemberdayaan Masyarakat Riau	1 Kegiatan	3.900.000	
	179 Pendampingan Di Luar Pengadilan Riau	1 Kegiatan	2.900.000	
	180 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Riau	1 Kegiatan	500.000	
	181 Penyuluhan Hukum Sumatera Selatan	1 Kegiatan	4.690.000	
	182 Konsultasi Hukum Sumatera Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	183 Investigasi Perkara Sumatera Selatan	1 Kegiatan	600.000	
	184 Penelitian Hukum Sumatera Selatan	1 Kegiatan	2.500.000	
	185 Mediasi Sumatera Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	186 Negosiasi Sumatera Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	187 Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan	1 Kegiatan	4.060.000	
	188 Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Selatan	1 Kegiatan	2.900.000	
	189 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Sumatera Selatan	1 Kegiatan	500.000	
	190 Penyuluhan Hukum Lampung	1 Kegiatan	4.600.000	
	191 Konsultasi Hukum Lampung	1 Kegiatan	1.050.000	
	192 Investigasi Perkara Lampung	1 Kegiatan	600.000	
	193 Penelitian Hukum Lampung	1 Kegiatan	2.500.000	
	194 Mediasi Lampung	1 Kegiatan	1.050.000	
	195 Negosiasi Lampung	1 Kegiatan	1.050.000	
	196 Pemberdayaan Masyarakat Lampung	1 Kegiatan	4.000.000	
	197 Pendampingan Di Luar Pengadilan Lampung	1 Kegiatan	2.900.000	
	198 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Lampung	1 Kegiatan	500.000	
	199 Penyuluhan Hukum Kalimantan Barat	1 Kegiatan	4.540.000	
	200 Konsultasi Hukum Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	201 Investigasi Perkara Kalimantan Barat	1 Kegiatan	600.000	
	202 Penelitian Hukum Kalimantan Barat	1 Kegiatan	2.500.000	
	203 Mediasi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	204 Negosiasi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	205 Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Barat	1 Kegiatan	3.960.000	
	206 Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Barat	1 Kegiatan	2.900.000	
	207 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Kalimantan Barat	1 Kegiatan	500.000	
	208 Penyuluhan Hukum Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	4.600.000	
	209 Konsultasi Hukum Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	210 Investigasi Perkara Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	600.000	
	211 Penelitian Hukum Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	2.500.000	
	212 Mediasi Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	213 Negosiasi Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	1.050.000	
	214 Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	4.000.000	
	215 Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	2.900.000	
	216 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	500.000	
	217 Penyuluhan Hukum Kalimantan Timur	1 Kegiatan	4.660.000	
	218 Konsultasi Hukum Kalimantan Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	219 Investigasi Perkara Kalimantan Timur	1 Kegiatan	600.000	
	220 Penelitian Hukum Kalimantan Timur	1 Kegiatan	2.500.000	
	221 Mediasi Kalimantan Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	222 Negosiasi Kalimantan Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	223 Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur	1 Kegiatan	4.040.000	
	224 Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Timur	1 Kegiatan	2.900.000	
	225 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Kalimantan Timur	1 Kegiatan	500.000	
	226 Penyuluhan Hukum Sulawesi Utara	1 Kegiatan	4.750.000	
	227 Konsultasi Hukum Sulawesi Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	228 Investigasi Perkara Sulawesi Utara	1 Kegiatan	600.000	
	229 Penelitian Hukum Sulawesi Utara	1 Kegiatan	2.500.000	
	230 Mediasi Sulawesi Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	231 Negosiasi Sulawesi Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	232 Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Utara	1 Kegiatan	4.100.000	
	233 Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Utara	1 Kegiatan	2.900.000	
	234 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Sulawesi Utara	1 Kegiatan	500.000	
	235 Penyuluhan Hukum Bali	1 Kegiatan	4.630.000	
	236 Konsultasi Hukum Bali	1 Kegiatan	1.050.000	
	237 Investigasi Perkara Bali	1 Kegiatan	600.000	
	238 Penelitian Hukum Bali	1 Kegiatan	2.500.000	
	239 Mediasi Bali	1 Kegiatan	1.050.000	
	240 Negosiasi Bali	1 Kegiatan	1.050.000	
	241 Pemberdayaan Masyarakat Bali	1 Kegiatan	4.020.000	
	242 Pendampingan Di Luar Pengadilan Bali	1 Kegiatan	2.900.000	
	243 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Bali	1 Kegiatan	500.000	
	244 Penyuluhan Hukum Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	4.660.000	
	245 Konsultasi Hukum Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	246 Investigasi Perkara Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	600.000	
	247 Penelitian Hukum Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	2.500.000	
	248 Mediasi Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	249 Negosiasi Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	1.050.000	
	250 Pemberdayaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	4.040.000	
	251 Pendampingan Di Luar Pengadilan Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	2.900.000	
	252 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Nusa Tenggara Timur	1 Kegiatan	500.000	
	253 Penyuluhan Hukum Maluku	1 Kegiatan	4.780.000	
	254 Konsultasi Hukum Maluku	1 Kegiatan	1.050.000	

6 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	255 Investigasi Perkara Maluku	1 Kegiatan	600.000	
	256 Penelitian Hukum Maluku	1 Kegiatan	2.500.000	
	257 Mediasi Maluku	1 Kegiatan	1.050.000	
	258 Negosiasi Maluku	1 Kegiatan	1.050.000	
	259 Pemberdayaan Masyarakat Maluku	1 Kegiatan	4.120.000	
	260 Pendampingan Di Luar Pengadilan Maluku	1 Kegiatan	2.900.000	
	261 Drafting Dokumen Hukum Maluku	1 Kegiatan	500.000	
	262 Penyuluhan Hukum Papua	1 Kegiatan	5.530.000	
	263 Konsultasi Hukum Papua	1 Kegiatan	1.050.000	
	264 Investigasi Perkara Papua	1 Kegiatan	600.000	
	265 Penelitian Hukum Papua	1 Kegiatan	2.500.000	
	266 Mediasi Papua	1 Kegiatan	1.050.000	
	267 Negosiasi Papua	1 Kegiatan	1.050.000	
	268 Pemberdayaan Masyarakat Papua	1 Kegiatan	4.620.000	
	269 Pendampingan Di Luar Pengadilan Papua	1 Kegiatan	2.900.000	
	270 Drafting Dokumen Hukum Papua	1 Kegiatan	500.000	
	271 Penyuluhan Hukum Jambi	1 Kegiatan	4.480.000	
	272 Konsultasi Hukum Jambi	1 Kegiatan	1.050.000	
	273 Investigasi Perkara Jambi	1 Kegiatan	600.000	
	274 Penelitian Hukum Jambi	1 Kegiatan	2.500.000	
	275 Mediasi Jambi	1 Kegiatan	1.050.000	
	276 Negosiasi Jambi	1 Kegiatan	1.050.000	
	277 Pemberdayaan Masyarakat Jambi	1 Kegiatan	3.920.000	
	278 Pendampingan Di Luar Pengadilan Jambi	1 Kegiatan	2.900.000	
	279 Drafting Dokumen Hukum Jambi	1 Kegiatan	500.000	
	280 Penyuluhan Hukum Bengkulu	1 Kegiatan	4.600.000	
	281 Konsultasi Hukum Bengkulu	1 Kegiatan	1.050.000	
	282 Investigasi Perkara Bengkulu	1 Kegiatan	600.000	
	283 Penelitian Hukum Bengkulu	1 Kegiatan	2.500.000	
	284 Mediasi Bengkulu	1 Kegiatan	1.050.000	
	285 Negosiasi Bengkulu	1 Kegiatan	1.050.000	
	286 Pemberdayaan Masyarakat Bengkulu	1 Kegiatan	4.000.000	
	287 Pendampingan Di Luar Pengadilan Bengkulu	1 Kegiatan	2.900.000	
	288 Drafting Dokumen Hukum Bengkulu	1 Kegiatan	500.000	
	289 Penyuluhan Hukum Di Yogyakarta	1 Kegiatan	4.300.000	
	290 Konsultasi Hukum Di Yogyakarta	1 Kegiatan	1.050.000	
	291 Investigasi Perkara Di Yogyakarta	1 Kegiatan	600.000	
	292 Penelitian Hukum Di Yogyakarta	1 Kegiatan	2.500.000	
	293 Mediasi Di Yogyakarta	1 Kegiatan	1.050.000	
	294 Negosiasi Di Yogyakarta	1 Kegiatan	1.050.000	
	295 Pemberdayaan Masyarakat Di Yogyakarta	1 Kegiatan	3.800.000	
	296 Pendampingan Di Luar Pengadilan Di Yogyakarta	1 Kegiatan	2.900.000	
	297 Drafting Dokumen Hukum Di Yogyakarta	1 Kegiatan	500.000	
	298 Penyuluhan Hukum Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	4.450.000	
	299 Konsultasi Hukum Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	300 Investigasi Perkara Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	600.000	
	301 Penelitian Hukum Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	2.500.000	
	302 Mediasi Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	303 Negosiasi Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	304 Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	3.900.000	
	305 Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	2.900.000	
	306 Drafting Dokumen Hukum Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	500.000	
	307 Penyuluhan Hukum Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	4.660.000	
	308 Konsultasi Hukum Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	1.050.000	
	309 Investigasi Perkara Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	600.000	
	310 Penelitian Hukum Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	2.500.000	
	311 Mediasi Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	1.050.000	
	312 Negosiasi Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	1.050.000	
	313 Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	4.040.000	
	314 Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	2.900.000	
	315 Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Tenggara	1 Kegiatan	500.000	
	316 Penyuluhan Hukum Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	4.540.000	
	317 Konsultasi Hukum Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	318 Investigasi Perkara Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	600.000	
	319 Penelitian Hukum Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	2.500.000	
	320 Mediasi Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	321 Negosiasi Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	1.050.000	
	322 Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	3.960.000	
	323 Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	2.900.000	
	324 Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Tengah	1 Kegiatan	500.000	
	325 Penyuluhan Hukum Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	4.540.000	
	326 Konsultasi Hukum Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	327 Investigasi Perkara Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	600.000	
	328 Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	2.500.000	
	329 Mediasi Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	330 Negosiasi Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	331 Pemberdayaan Masyarakat Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	3.960.000	
	332 Pendampingan Di Luar Pengadilan Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	2.900.000	
	333 Drafting Dokumen Hukum Nusa Tenggara Barat	1 Kegiatan	500.000	
	334 Penyuluhan Hukum Banten	1 Kegiatan	4.810.000	
	335 Konsultasi Hukum Banten	1 Kegiatan	1.050.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	336 Investigasi Perkara Banten	1 Kegiatan	600.000	
	337 Penelitian Hukum Banten	1 Kegiatan	2.500.000	
	338 Mediasi Banten	1 Kegiatan	1.050.000	
	339 Negosiasi Banten	1 Kegiatan	1.050.000	
	340 Pemberdayaan Masyarakat Banten	1 Kegiatan	4.140.000	
	341 Pendampingan Di Luar Pengadilan Banten	1 Kegiatan	2.900.000	
	342 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Banten	1 Kegiatan	500.000	
	343 Penyuluhan Hukum Bangka Belitung	1 Kegiatan	4.540.000	
	344 Konsultasi Hukum Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.050.000	
	345 Investigasi Perkara Bangka Belitung	1 Kegiatan	600.000	
	346 Penelitian Hukum Bangka Belitung	1 Kegiatan	2.500.000	
	347 Mediasi Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.050.000	
	348 Negosiasi Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.050.000	
	349 Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung	1 Kegiatan	3.960.000	
	350 Pendampingan Di Luar Pengadilan Bangka Belitung	1 Kegiatan	2.900.000	
	351 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Bangka Belitung	1 Kegiatan	500.000	
	352 Penyuluhan Hukum Gorontalo	1 Kegiatan	4.540.000	
	353 Konsultasi Hukum Gorontalo	1 Kegiatan	1.050.000	
	354 Investigasi Perkara Gorontalo	1 Kegiatan	600.000	
	355 Penelitian Hukum Gorontalo	1 Kegiatan	2.500.000	
	356 Mediasi Gorontalo	1 Kegiatan	1.050.000	
	357 Negosiasi Gorontalo	1 Kegiatan	1.050.000	
	358 Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo	1 Kegiatan	3.960.000	
	359 Pendampingan Di Luar Pengadilan Gorontalo	1 Kegiatan	2.900.000	
	360 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Gorontalo	1 Kegiatan	500.000	
	361 Penyuluhan Hukum Maluku Utara	1 Kegiatan	5.380.000	
	362 Konsultasi Hukum Maluku Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	363 Investigasi Perkara Maluku Utara	1 Kegiatan	600.000	
	364 Penelitian Hukum Maluku Utara	1 Kegiatan	2.500.000	
	365 Mediasi Maluku Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	366 Negosiasi Maluku Utara	1 Kegiatan	1.050.000	
	367 Pemberdayaan Masyarakat Maluku Utara	1 Kegiatan	4.520.000	
	368 Pendampingan Di Luar Pengadilan Maluku Utara	1 Kegiatan	2.900.000	
	369 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Maluku Utara	1 Kegiatan	500.000	
	370 Penyuluhan Hukum Papua Barat	1 Kegiatan	5.410.000	
	371 Konsultasi Hukum Papua Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	372 Investigasi Perkara Papua Barat	1 Kegiatan	600.000	
	373 Penelitian Hukum Papua Barat	1 Kegiatan	2.500.000	
	374 Mediasi Papua Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	375 Negosiasi Papua Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	376 Pemberdayaan Masyarakat Papua Barat	1 Kegiatan	4.540.000	
	377 Pendampingan Di Luar Pengadilan Papua Barat	1 Kegiatan	2.900.000	
	378 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Papua Barat	1 Kegiatan	500.000	
	379 Penyuluhan Hukum Kepulauan Riau	1 Kegiatan	4.780.000	
	380 Konsultasi Hukum Kepulauan Riau	1 Kegiatan	1.050.000	
	381 Investigasi Perkara Kepulauan Riau	1 Kegiatan	600.000	
	382 Penelitian Hukum Kepulauan Riau	1 Kegiatan	2.500.000	
	383 Mediasi Kepulauan Riau	1 Kegiatan	1.050.000	
	384 Negosiasi Kepulauan Riau	1 Kegiatan	1.050.000	
	385 Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau	1 Kegiatan	4.120.000	
	386 Pendampingan Di Luar Pengadilan Kepulauan Riau	1 Kegiatan	2.900.000	
	387 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Kepulauan Riau	1 Kegiatan	500.000	
	388 Penyuluhan Hukum Sulawesi Barat	1 Kegiatan	4.810.000	
	389 Konsultasi Hukum Sulawesi Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	390 Investigasi Perkara Sulawesi Barat	1 Kegiatan	600.000	
	391 Penelitian Hukum Sulawesi Barat	1 Kegiatan	2.500.000	
	392 Mediasi Sulawesi Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	393 Negosiasi Sulawesi Barat	1 Kegiatan	1.050.000	
	394 Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat	1 Kegiatan	4.140.000	
	395 Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Barat	1 Kegiatan	2.900.000	
	396 <i>Drafting</i> Dokumen Hukum Sulawesi Barat	1 Kegiatan	500.000	
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Diklat Berbasis Kompetensi Di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi APGAKUM Bagi Instansi Terkait	30 Orang	275.750.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
015.01	Sekretariat Jenderal				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Laporan Pembinaan dan Pemeriksaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris				
	1 Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP)	77	Laporan	3.058.415.000	
015.02	Inspektorat Jenderal	2	Laporan	2.767.566.000	
015.03	Direktorat Jenderal Anggaran				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Peraturan Bidang Penganggaran				
	1 PMK Tata Cara Revisi Anggaran	1	Peraturan	1.038.510.000	
	2 PMK tentang Standar Biaya Masukan	1	Peraturan	1.544.198.000	
	3 PMK tentang Standar Biaya Keluaran	1	Peraturan	840.765.000	
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	4 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	680	Orang	2.612.707.000	
015.04	Direktorat Jenderal Pajak				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Luar Jawa				
	1 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	1	Berkas	209.250.000	
	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Dokumen di Bidang Penyidikan				
	2 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	2	Berkas	418.500.000	
015.05	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3	Dokumen	11.605.000.000	
015.08	Direktorat Jenderal Perbendaharaan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	LKPP Tingkat Kuasa BUN				
	1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VI	12	Laporan	180.724.000	
	2 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta V	12	Laporan	207.924.000	
	3 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV	12	Laporan	198.132.000	
	4 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta III	12	Laporan	195.684.000	
	5 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta II	12	Laporan	185.076.000	

L Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	6 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta I	12	Laporan	180.180.000	
	7 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah	12	Laporan	195.684.000	
	8 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung I	12	Laporan	171.266.000	
	9 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung II	12	Laporan	147.158.000	
	10 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cirebon	12	Laporan	137.970.000	
	11 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bogor	12	Laporan	153.554.000	
	12 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sukabumi	12	Laporan	144.438.000	
	13 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tasikmalaya	12	Laporan	163.590.000	
	14 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwakarta	12	Laporan	119.618.000	
	15 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Karawang	12	Laporan	110.642.000	
	16 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Garut	12	Laporan	111.550.000	
	17 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumedang	12	Laporan	108.770.000	
	18 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuningan	12	Laporan	125.294.000	
	19 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VII	12	Laporan	194.868.000	
	20 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bekasi	12	Laporan	117.786.000	
	21 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarnegara	12	Laporan	110.678.000	
	22 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwodadi	12	Laporan	109.118.000	
	23 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sragen	12	Laporan	114.506.000	
	24 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Klaten	12	Laporan	118.886.000	
	25 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cilacap	12	Laporan	113.622.000	
	26 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pati	12	Laporan	112.822.000	
	27 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purworejo	12	Laporan	112.386.000	
	28 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tegal	12	Laporan	142.014.000	
	29 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Magelang	12	Laporan	134.382.000	
	30 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kudus	12	Laporan	132.858.000	
	31 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekalongan	12	Laporan	128.194.000	
	32 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwokerto	12	Laporan	129.542.000	
	33 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surakarta	12	Laporan	135.542.000	
	34 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang II	12	Laporan	141.194.000	
	35 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang II	12	Laporan	123.294.000	
	36 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Blitar	12	Laporan	152.756.000	
	37 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tuban	12	Laporan	106.852.000	
	38 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidoarjo	12	Laporan	121.136.000	
	39 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jember	12	Laporan	121.556.000	
	40 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pacitan	12	Laporan	107.156.000	
	41 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mojokerto	12	Laporan	124.268.000	
	42 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banyuwangi	12	Laporan	113.852.000	
	43 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bojonegoro	12	Laporan	118.108.000	
	44 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pamekasan	12	Laporan	150.772.000	
	45 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bondowoso	12	Laporan	149.532.000	
	46 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Madiun	12	Laporan	175.580.000	
	47 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kediri	12	Laporan	150.868.000	
	48 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Malang	12	Laporan	169.536.000	
	49 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya II	12	Laporan	145.400.000	
	50 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya I	12	Laporan	137.464.000	
	51 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wonosari	12	Laporan	113.760.000	
	52 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wates	12	Laporan	111.560.000	
	53 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Yogyakarta	12	Laporan	183.000.000	
	54 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lhokseumawe	12	Laporan	169.106.000	
	55 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kutacane	12	Laporan	118.802.000	
	56 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Takengon	12	Laporan	124.222.000	

L Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	57 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tapak Tuan	12 Laporan	134.690.000	
	58 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Langsa	12 Laporan	138.974.000	
	59 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Meulaboh	12 Laporan	152.730.000	
	60 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banda Aceh	12 Laporan	252.326.000	
	61 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang Sidempuan	12 Laporan	152.838.000	
	62 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Balige	12 Laporan	124.222.000	
	63 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi	12 Laporan	120.974.000	
	64 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sibolga	12 Laporan	115.298.000	
	65 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidikalang	12 Laporan	115.386.000	
	66 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rantau Prapat	12 Laporan	116.970.000	
	67 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Balai	12 Laporan	120.234.000	
	68 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Gunung Sitoli	12 Laporan	125.522.000	
	69 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pematang Siantar	12 Laporan	114.370.000	
	70 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan II	12 Laporan	157.330.000	
	71 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan I	12 Laporan	133.146.000	
	72 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Painan	12 Laporan	110.200.000	
	73 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuk Sikaping	12 Laporan	115.180.000	
	74 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Solok	12 Laporan	119.900.000	
	75 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sijunjung	12 Laporan	116.400.000	
	76 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bukittinggi	12 Laporan	170.000.000	
	77 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang	12 Laporan	193.940.000	
	78 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sekayu	12 Laporan	115.462.000	
	79 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Baturaja	12 Laporan	124.310.000	
	80 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuklinggau	12 Laporan	117.066.000	
	81 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lahat	12 Laporan	131.066.000	
	82 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palembang	12 Laporan	188.342.000	
	83 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Dumai	12 Laporan	128.530.000	
	84 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rengat	12 Laporan	121.770.000	
	85 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekanbaru	12 Laporan	193.510.000	
	86 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bangko	12 Laporan	113.552.000	
	87 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuala Tungkal	12 Laporan	111.732.000	
	88 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Muara Bungo	12 Laporan	114.424.000	
	89 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sungai Penuh	12 Laporan	111.152.000	
	90 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jambi	12 Laporan	179.004.000	
	91 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Metro	12 Laporan	119.900.000	
	92 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Liwa	12 Laporan	104.780.000	
	93 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandar Lampung	12 Laporan	202.580.000	
	94 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabumi	12 Laporan	142.660.000	
	95 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pontianak	12 Laporan	180.936.000	
	96 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sintang	12 Laporan	108.448.000	
	97 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ketapang	12 Laporan	123.812.000	
	98 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Singkawang	12 Laporan	112.666.000	
	99 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Putussibau	12 Laporan	106.780.000	
	100 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sanggau	12 Laporan	114.982.000	
	101 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palangkaraya	12 Laporan	176.470.000	
	102 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Buntok	12 Laporan	139.770.000	
	103 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkalan Bun	12 Laporan	111.620.000	
	104 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sampit	12 Laporan	122.130.000	
	105 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Amlapura	12 Laporan	125.846.000	
	106 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Singaraja	12 Laporan	127.350.000	
	107 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Denpasar	12 Laporan	193.258.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	108 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumbawa Besar	12 Laporan	123.808.000	
	109 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bima	12 Laporan	129.396.000	
	110 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Selong	12 Laporan	108.488.000	
	111 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mataram	12 Laporan	179.080.000	
	112 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kupang	12 Laporan	187.296.000	
	113 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Larantuka	12 Laporan	126.968.000	
	114 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Atambua	12 Laporan	116.976.000	
	115 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ruteng	12 Laporan	135.596.000	
	116 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Waingapu	12 Laporan	120.988.000	
	117 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ende	12 Laporan	135.076.000	
	118 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Toli-Toli	12 Laporan	121.668.000	
	119 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Poso	12 Laporan	120.884.000	
	120 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Luwuk	12 Laporan	120.704.000	
	121 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palu	12 Laporan	180.472.000	
	122 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sinjai	12 Laporan	108.690.000	
	123 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makale	12 Laporan	115.814.000	
	124 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Benteng	12 Laporan	112.026.000	
	125 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Watampone	12 Laporan	131.698.000	
	126 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palopo	12 Laporan	136.578.000	
	127 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bantaeng	12 Laporan	130.794.000	
	128 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pare-Pare	12 Laporan	149.546.000	
	129 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar II	12 Laporan	155.706.000	
	130 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar I	12 Laporan	159.562.000	
	131 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Raha	12 Laporan	112.732.000	
	132 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kolaka	12 Laporan	116.388.000	
	133 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bau-Bau	12 Laporan	138.308.000	
	134 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kendari	12 Laporan	189.528.000	
	135 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jayapura	12 Laporan	243.866.000	
	136 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Biak	12 Laporan	163.618.000	
	137 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Merauke	12 Laporan	190.838.000	
	138 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nabire	12 Laporan	172.986.000	
	139 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wamena	12 Laporan	171.626.000	
	140 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Serui	12 Laporan	159.882.000	
	141 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Timika	12 Laporan	156.760.000	
	142 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Muko-Muko	12 Laporan	108.140.000	
	143 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Curup	12 Laporan	124.860.000	
	144 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manna	12 Laporan	125.120.000	
	145 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bengkulu	12 Laporan	176.420.000	
	146 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ternate	12 Laporan	228.656.000	
	147 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tobelo	12 Laporan	133.560.000	
	148 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkal Pinang	12 Laporan	196.372.000	
	149 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pandan	12 Laporan	113.888.000	
	150 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Fak-Fak	12 Laporan	151.730.000	
	151 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sorong	12 Laporan	189.770.000	
	152 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manokwari	12 Laporan	187.138.000	
	153 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mamuju	12 Laporan	157.586.000	
	154 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Majene	12 Laporan	124.282.000	
	155 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Masohi	12 Laporan	133.596.000	
	156 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Saumlaki	12 Laporan	125.380.000	
	157 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual	12 Laporan	132.580.000	
	158 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ambon	12 Laporan	185.072.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	159 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bitung	12	Laporan	120.870.000	
	160 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotamubagu	12	Laporan	126.950.000	
	161 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahuna	12	Laporan	125.030.000	
	162 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manado	12	Laporan	201.150.000	
	163 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Gorontalo	12	Laporan	177.264.000	
	164 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Marisa	12	Laporan	110.262.000	
	165 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarmasin	12	Laporan	203.780.000	
	166 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Barabai	12	Laporan	145.660.000	
	167 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung	12	Laporan	148.040.000	
	168 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabaru	12	Laporan	112.620.000	
	169 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pelaihari	12	Laporan	101.300.000	
	170 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Samarinda	12	Laporan	197.176.000	
	171 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Balikpapan	12	Laporan	157.248.000	
	172 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Redep	12	Laporan	113.844.000	
	173 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tarakan	12	Laporan	171.428.000	
	174 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nunukan	12	Laporan	120.284.000	
	175 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rangkasbitung	12	Laporan	108.446.000	
	176 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tangerang	12	Laporan	146.426.000	
	177 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Serang	12	Laporan	191.534.000	
	178 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pinang	12	Laporan	154.424.000	
	179 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Batam	12	Laporan	138.704.000	
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran				
	(Sub Output)				
	Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan				
	1 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 3 s.d. 5 Hari	1	Peserta	2.455.300	
	2 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 6 s.d. 12 Hari	1	Peserta	4.800.066	
	3 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 13 s.d. 16 Hari	1	Peserta	5.761.033	
	4 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 17 s.d. 19 Hari	1	Peserta	7.087.700	
	Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai				
	5 Diklat Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai	1	Layanan	10.609.166	
	6 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai	1	Layanan	21.919.566	
	7 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai (Di Luar Kantor)	1	Layanan	53.379.566	
	8 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan	1	Layanan	14.127.200	
	9 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan (Di Luar Kantor)	1	Layanan	24.956.366	
	10 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Ketrampilan Senjata	1	Layanan	3.471.600	
	11 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai <i>Post Clearance Audit</i>	1	Layanan	19.198.533	
	12 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Penindakan Kepabeanan dan Cukai	1	Layanan	19.387.166	
	13 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 24 s.d. 28 Hari	1	Layanan	10.438.800	
	14 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 20 s.d. 23 Hari	1	Layanan	8.484.066	
	15 Diklat Teknis Substantif Spcsialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 16 s.d. 19 Hari	1	Layanan	6.849.800	
	16 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 13 s.d. 15 Hari (Dengan Praktek Kerja Lapangan)	1	Layanan	6.511.100	
	17 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 13 s.d. 15 Hari (Tanpa Praktek Kerja Lapangan)	1	Layanan	5.158.433	
	18 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi/Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Selama 9 s.d. 12 Hari	1	Layanan	4.627.333	
	19 <i>Workshop</i> Bidang Bea dan Cukai (Di Luar Kantor)	1	Layanan	8.773.966	

ABW

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	20 <i>Workshop</i> Bidang Bea dan Cukai (Dengan Praktek Kerja Lapangan)	1 Layanan	2.625.100	
	21 <i>Workshop</i> Bidang Bea dan Cukai (Tanpa Praktek Kerja Lapangan)	1 Layanan	3.104.233	
	Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan			
	22 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Tidak Diasramakan)	1 Layanan	1.661.733	
	23 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	2.353.566	
	24 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Di Luar Kantor)	1 Layanan	3.296.900	
	25 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 6 s.d. 10 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	3.487.733	
	26 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 11 s.d. 20 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	6.445.700	
	27 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 21 s.d. 25 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	9.025.600	
	28 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 26 s.d. 29 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	12.117.466	
	29 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 31 s.d. 35 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	13.237.466	
	Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum			
	30 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 3 s.d. 5 Hari	1 Layanan	2.468.066	
	31 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 6 s.d. 10 Hari	1 Layanan	3.606.466	
	32 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 11 s.d. 15 Hari	1 Layanan	5.243.100	
	33 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 16 s.d. 20 Hari	1 Layanan	6.948.066	
	34 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	5.946.166	
	35 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 6 s.d. 10 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	9.114.966	
	36 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 11 s.d. 15 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	14.135.600	
	Layanan Kediklatan di Bidang Perpajakan			
	37 Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Tidak Diasramakan)	1 Layanan	1.758.900	
	38 Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	2.569.233	
	39 Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Di Luar Kantor)	1 Layanan	6.055.233	
	40 Diklat Bidang Perpajakan Selama 10 s.d. 12 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	4.766.666	
	41 Diklat Bidang Perpajakan Selama 10 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal (Di Luar Kantor)	1 Layanan	11.430.900	
	42 Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s.d. 19 Hari (Diasramakan)	1 Layanan	7.294.133	
	43 Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s.d. 19 Hari (Di Luar Kantor)	1 Layanan	17.862.600	
	44 Diklat Bidang Perpajakan Orientasi	1 Layanan	6.475.566	
	45 Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 22 Hari	1 Layanan	5.648.233	
	46 Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 32 Hari	1 Layanan	7.509.733	
	Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana			
	47 Diklat Ujian Dinas	1 Layanan	2.568.300	
	48 Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	1 Layanan	473.190	
	49 Diklat Bidang Pengembangan SDM <i>Capacity Building/In House Training</i>	1 Layanan	984.166	
	50 Diklat Bidang Pengembangan SDM Selama 3 s.d. 5 Hari	1 Layanan	3.677.333	
	51 Diklat Bidang Pengembangan SDM Persiapan Ke Luar Negeri	1 Layanan	57.937.800	
	Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan			
	52 Program Pendidikan Diploma I Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1 Layanan	12.021.829	
	53 Program Pendidikan Diploma III Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1 Layanan	13.611.426	
	54 Program Pendidikan Diploma IV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1 Layanan	14.381.291	

L dw

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Penelitian dan Pengembangan			
	55 Kajian Akademis Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan	1 Layanan	183.510.000	
	56 Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan	1 Layanan	114.220.000	

4 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Tersedianya Dokumen Anggaran dan Pelayanan Ketatausahaan Biro			
	1 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2018	1 Dokumen	836.039.000	
	Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja			
	2 Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian	1 Laporan	155.550.000	
	3 Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	1 Laporan	140.750.000	
	Tersedianya Dukungan Kegiatan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian			
	4 Publikasi Statistik Pertanian	1 Dokumen	174.616.000	
018.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	170 Rekomendasi	4.611.036.000	
	2 Rekomendasi Pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	7 Rekomendasi	1.438.572.000	
	3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta SAKIP Kementerian	14 Rekomendasi	541.952.000	
	4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	5 Rekomendasi	742.114.000	
	5 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	126 Rekomendasi	4.623.652.000	
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	88 Rekomendasi	1.438.572.000	
	7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2 Rekomendasi	415.832.000	
	8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	12 Rekomendasi	457.752.000	
	9 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	178 Rekomendasi	4.631.076.000	
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	50 Rekomendasi	1.438.572.000	
	11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	3 Rekomendasi	427.472.000	
	12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	18 Rekomendasi	447.094.000	
	13 Rekomendasi hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	150 Rekomendasi	4.616.076.000	
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	36 Rekomendasi	1.438.572.000	
	15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	5 Rekomendasi	412.472.000	
	16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	10 Rekomendasi	432.094.000	
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu			
	17 Audit Tujuan Tertentu	25 Rekomendasi	1.453.264.000	
	18 Audit Investigasi	211 Rekomendasi	1.344.660.000	

Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
018.03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI				
	1 Penerapan Penanganan DPI (Biopori)	1	Hektar	3.972.500	
	2 Penerapan Penanganan DPI (Biopori) Wilayah Khusus (NTT,Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara)	1	Hektar	4.432.500	
	3 Penerapan Penanganan DPI (Sumur Pantek)	1	Hektar	5.030.000	
	4 Penerapan Penanganan DPI (Sumur Pantek) Wilayah Khusus (NTT,Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara)	1	Hektar	6.270.000	
018.04	Direktorat Jenderal Holtikultura				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	1 GAP Cabai	1	Kelompok	32.670.000	
	2 GAP Bawang Merah	1	Kelompok	32.670.000	
	3 GAP Sayuran dan Tanaman Obat	1	Kelompok	32.670.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	PHT				
	4 PHT Wilayah Barat	1	Kelompok	40.516.000	
	5 PHT Wilayah Timur	1	Kelompok	46.767.000	
	GAP Buah dan Florikultura				
	6 GAP Buah	1	Kelompok	35.820.000	
	7 GAP Florikultura	1	Kelompok	38.000.000	
	GHP Holtikultura				
	8 GHP Buah	1	Kelompok	35.982.000	
	9 GHP Florikultura	1	Kelompok	26.417.000	
018.05	Direktorat Jenderal Perkebunan				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	SL-PHT Perkebunan				
	1 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Barat	1	KT	100.300.000	
	2 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	1	KT	103.210.000	
	3 SL-PHT Perkebunan Provinsi D.I Yogyakarta	1	KT	102.010.000	
	4 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Timur	1	KT	100.900.000	
	5 SL-PHT Perkebunan Provinsi Aceh	1	KT	112.730.000	
	6 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	1	KT	109.030.000	
	7 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	1	KT	109.030.000	
	8 SL-PHT Perkebunan Provinsi Riau	1	KT	110.630.000	
	9 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jambi	1	KT	103.920.000	
	10 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	1	KT	106.620.000	
	11 SL-PHT Perkebunan Provinsi Lampung	1	KT	105.520.000	
	12 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1	KT	106.410.000	
	13 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1	KT	124.520.000	
	14 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan	1	KT	105.210.000	
	15 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1	KT	114.720.000	
	16 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	1	KT	110.830.000	
	17 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah	1	KT	113.030.000	
	18 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1	KT	115.030.000	
	19 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara	1	KT	109.030.000	
	20 SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku	1	KT	135.150.000	
	21 SL-PHT Perkebunan Provinsi Bali	1	KT	93.790.000	
	22 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	KT	100.170.000	
	23 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	KT	118.530.000	
	24 SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua	1	KT	163.500.000	
	25 SL-PHT Perkebunan Provinsi Bengkulu	1	KT	104.070.000	
	26 SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku Utara	1	KT	141.060.000	
	27 SL-PHT Perkebunan Provinsi Banten	1	KT	99.700.000	
	28 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	KT	111.830.000	
	29 SL-PHT Perkebunan Provinsi Gorontalo	1	KT	106.920.000	
	30 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau	1	KT	113.530.000	
	31 SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua Barat	1	KT	158.080.000	
	32 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1	KT	111.030.000	
	33 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara	1	KT	111.920.000	
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan				
	1 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi	30	Orang	57.247.000	
	2 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	30	Orang	66.412.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR			
	3 Peningkatan Kapasitas Petugas IB	1 Orang	15.337.400	
	4 Peningkatan Kapasitas Petugas PKB/ATR	1 Orang	14.386.900	
018.08	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Mendukung Desa Organik			
	1 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Barat	1 Unit	311.500.000	
	2 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Tengah	1 Unit	306.000.000	
	3 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Timur	1 Unit	327.000.000	
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan			
	1 Bahan Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	244.700.000	
	Mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi			
	2 Mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi	100 Jenis	213.967.000	
	Bibit Sumber Ternak Unggulan			
	3 Bibit Unggul Ternak Ayam KUB-1	48500 Ekor	227.322.000	
	4 Bibit Unggul Ternak Itik Petelur	50990 Ekor	330.080.000	
	5 Bibit Unggul Ternak Domba Compass Agrinak	137 Ekor	213.125.000	
	Publikasi yang Diterbitkan			
	6 Penerbitan Publikasi Hasil Litbang Pertanian Berbahasa	2 Judul	275.530.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)			
	7 Penyusunan Satuan Biaya Penelitian Rumah Kaca	1 Teknologi	65.000.000	
	Benih Sumber Kentang			
	8 Benih Sumber Kentang	1 GO	3.458	
	Benih Sumber Bawang Merah			
	9 Benih Sumber Bawang Merah	1 Ton	23.150.000	
	VUB Bibit tebu			
	10 Bibit tebu G2	1 Budset	321	
	Benih sumber tanaman padi			
	11 Produksi Benih Penjenis (BS) Padi	1 Ton	31.120.000	
	12 Produksi Benih Dasar (FS) Padi	1 Ton	20.850.000	
	13 Produksi Benih Sebar (SS) Padi (per ton)	1 Ton	14.854.000	
	Benih sumber tanaman jagung			
	14 Produksi Benih Penjenis Jagung (BS)	1 Ton	43.175.000	
	15 Produksi Benih Dasar Jagung (FS)	1 Ton	36.215.000	
	16 Produksi Benih Pokok Jagung (SS)	1 Ton	31.600.000	
	Benih sumber tanaman kedelai			
	17 Produksi Benih Penjenis Kedelai (BS)	1 Ton	27.017.000	
	18 Produksi Benih Dasar Kedelai (FS)	1 Ton	22.983.000	
	19 Produksi Benih Pokok Kedelai (SS)	1 Ton	17.464.000	
	Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan			
	20 Kerjasama Hasil Inovasi Balitbangtan	1 Lisensi	85.000.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	21 Rumusan alternatif kebijakan responsif dan antisipasif isu-isu aktual pembangunan pertanian	1 Rekomendasi	103.588.000	
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian			
	1 Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong Wilayah Barat	1 Orang	5.109.333	
	2 Diklat Teknis Pemeriksaan Kesehatan Daging (Keurmaster) Bagi Petugas, Wilayah Barat	1 Orang	5.789.166	
	3 Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) pada Sapi Bagi Petugas, Wilayah Barat	1 Orang	9.162.766	
	4 Diklat Teknis Kesehatan Hewan Bagi Petugas, di Wilayah Barat	1 Orang	5.275.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	5 Diklat Teknis Pengolahan Limbah Ternak, Wilayah Barat.	1	Orang	5.640.833	
	6 Diklat Inseminasi Buatan Wilayah Barat.	1	Orang	12.508.500	
	7 Diklat Agribisnis Sapi Perah Wilayah Barat.	1	Orang	5.521.166	
	8 Diklat Pakan Ternak Wilayah Barat	1	Orang	5.640.833	
	9 Diklat Sapi Potong Wilayah Barat.	1	Orang	5.627.166	
	10 Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Daging Wilayah Barat.	1	Orang	5.521.166	
	11 Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Susu Wilayah Barat.	1	Orang	5.487.833	
	12 Diklat Butcher Wilayah Barat.	1	Orang	6.593.833	
	13 Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Tengah.	1	Orang	6.473.000	
	14 Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan Wilayah Tengah.	1	Orang	6.473.000	
	15 Diklat Teknis Budidaya Kakao Wilayah Tengah	1	Orang	6.489.666	
	16 Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit Wilayah Tengah	1	Orang	6.489.666	
	17 Diklat Penanganan Pasca Panen Jagung Wilayah Tengah	1	Orang	6.456.333	
	18 Diklat Teknis Tata Guna Air (TGA) Wilayah Tengah	1	Orang	7.097.000	
	19 Diklat Penanganan Pasca Panen Kakao Wilayah Timur	1	Orang	6.258.333	
	20 Diklat Teknologi Budidaya Kakao Wilayah Timur	1	Orang	6.293.666	
	21 Diklat Teknologi Budidaya Melon Wilayah Timur	1	Orang	6.293.666	
	22 Diklat Pengolahan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik Wilayah Timur	1	Orang	6.293.666	
	23 Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Wilayah Timur	1	Orang	7.054.666	
	24 Diklat Penanganan Alat Mekanisasi Pertanian Wilayah Timur	1	Orang	7.057.000	
	25 Diklat Operator Mesin Pertanian Wilayah Timur	1	Orang	6.293.666	
	26 Diklat Bongkar Pasang Mesin Pertanian Wilayah Timur	1	Orang	6.293.666	
	27 Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Wilayah Timur	1	Orang	8.688.666	
	28 Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan Wilayah Timur	1	Orang	8.722.000	
	29 Diklat Agribisnis Sapi Potong Wilayah Timur	1	Orang	8.341.000	
	30 Diklat Pengolahan Hasil Ternak Wilayah Timur	1	Orang	6.990.000	
	31 Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Wilayah Timur	1	Orang	6.970.000	
	32 Diklat Perawatan Induk dan Pedet Wilayah Timur	1	Orang	6.970.000	
	33 Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Timur	1	Orang	6.960.000	
	34 Diklat Agribisnis Ternak Kambing Wilayah Timur	1	Orang	6.957.500	
	35 Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Wilayah Timur	1	Orang	6.867.666	
	36 Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Pangan Wilayah Barat	1	Orang	5.087.933	
	37 Diklat Teknis Terakreditasi Karet Wilayah Barat	1	Orang	5.107.133	
	38 Diklat Teknis Terakreditasi Kelapa Sawit Wilayah Barat	1	Orang	5.352.800	
	39 Diklat Teknis Terakreditasi Pasca Panen Kakao Wilayah Barat	1	Orang	5.112.966	
	40 Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Jamur Tiram Wilayah Barat	1	Orang	5.096.133	
	41 Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Buah Naga Wilayah Barat	1	Orang	5.099.633	
	42 Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Durian Wilayah Barat	1	Orang	5.112.966	
	43 Diklat Teknis Agribisnis Tebu Wilayah Barat	1	Orang	5.197.000	
	44 Diklat Teknis Agribisnis Sayuran Organik Wilayah Barat	1	Orang	5.197.000	
	45 Diklat Teknis Agribisnis Pisang Wilayah Barat	1	Orang	5.197.000	
	46 Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Wilayah Timur	1	Orang	3.615.000	
	47 Diklat Budidaya Sayuran Bagi Petugas Wilayah Timur	1	Orang	3.615.000	
	48 Diklat Diversifikasi Pangan dan Gizi Bagi Petugas Wilayah Timur	1	Orang	3.785.000	
	49 Diklat Media Tercetak Bagi Penyuluh Wilayah Barat	1	Orang	5.799.333	
	50 Diklat Alat Bantu Presentasi Wilayah Barat	1	Orang	5.799.333	
	51 Diklat Pembuatan Display Pameran Wilayah Barat	1	Orang	5.799.333	
	52 Diklat Audio Visual Bagi Penyuluh Pertanian Wilayah Barat	1	Orang	5.799.333	
	53 Diklat Pembuatan Website Bagi Petugas Wilayah Barat	1	Orang	6.324.333	
	54 Diklat Penulisan Ilmiah Populer Wilayah Barat	1	Orang	5.799.333	
	55 Diklat Teknis Perencanaan Bagi Petugas Wilayah Barat	1	Orang	6.324.333	
	56 Diklat Keptokoleran Bagi Petugas Wilayah Barat	1	Orang	5.919.333	
	57 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil Wilayah Barat	1	Orang	7.094.833	
	58 Diklat Alih Kelompok Bagi Fungsional Pengawas Bibit Ternak Wilayah Barat	1	Orang	6.954.833	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	59 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak Terampil Wilayah Barat	1	Orang	7.246.033	
	60 Diklat Alih Kelompok Bagi Pengawas Mutu Pakan Ternak Wilayah Barat	1	Orang	6.954.833	
	61 Diklat Dasar PMHP Ahli Wilayah Barat	1	Orang	12.217.666	
	62 Diklat Dasar POLT Terampil Wilayah Barat	1	Orang	11.127.666	
	63 Diklat Dasar LP Terampil Wilayah Barat	1	Orang	11.394.333	
	64 Diklat Dasar POPT Ahli Wilayah Barat	1	Orang	12.901.000	
	65 Diklat Alih Kelompok Bagi PBT Wilayah Barat	1	Orang	9.743.666	
	66 Diklat Alih Kelompok Bagi PP Wilayah Barat	1	Orang	9.303.666	
	67 Diklat Dasar PBT Terampil Wilayah Barat	1	Orang	9.743.666	
	68 Diklat Pengawas Mutu Pakan Ahli Wilayah Barat	1	Orang	8.276.666	
	69 Diklat Pengawas Bibit Ternak Ahli Wilayah Barat	1	Orang	8.208.500	
	70 Diklat Fungsional Paramedik Veteriner Wilayah Barat	1	Orang	8.008.500	
	71 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil Wilayah Tengah	1	Orang	10.516.333	
	72 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli Wilayah Tengah	1	Orang	10.516.333	
	73 Diklat Dasar Alih Kelompok Penyuluh Pertanian Wilayah Tengah	1	Orang	8.749.666	
	74 Diklat Dasar Terampil Pengawas Bibit Ternak Wilayah Tengah	1	Orang	9.067.000	
	75 Diklat Dasar Terampil Pengawas Mutu Pakan Wilayah Timur	1	Orang	8.733.000	
	76 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil Wilayah Timur	1	Orang	10.804.000	
	77 Diklat ATC Bagi Pelajar Wilayah Timur	1	Orang	5.167.666	
	78 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Barat	1	Orang	3.160.000	
	79 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Tengah	1	Orang	3.163.333	
	80 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Timur	1	Orang	3.395.000	
	81 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Kepulauan	1	Orang	4.298.333	
	Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan Pertanian				
	82 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Medan	1	Orang	36.254.025	
	83 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Perkebunan di STPP Medan	1	Orang	36.404.025	
	84 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Bogor	1	Orang	36.682.125	
	85 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Bogor	1	Orang	37.080.625	
	86 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Magelang	1	Orang	38.016.400	
	87 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Magelang	1	Orang	39.205.825	
	88 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Malang	1	Orang	38.971.050	
	89 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Malang	1	Orang	39.471.050	
	90 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Gowa	1	Orang	43.261.450	
	91 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Gowa	1	Orang	43.561.450	
	92 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Manokwari	1	Orang	54.535.550	
	93 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Manowari	1	Orang	54.835.550	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani				
	94 Pembinaan Kelompok Tani oleh Penyuluh di Lokasi Sentra Pangan	1	Unit	7.500.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian				
	95 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Barat	1	Unit	61.200.000	
	96 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Tengah	1	Unit	75.975.000	
	97 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Timur	1	Unit	90.250.000	
018.11	Badan Ketahanan Pangan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
1	Penanganan SKPG	1	Lokasi	50.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerja sama			
2	Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Barat	1 Dokumen	581.110.000	
3	Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Wilayah Timur	1 Dokumen	692.490.000	
4	Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	459.430.000	
5	Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Anggaran)	1 Dokumen	482.245.000	
6	Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Alokasi Anggaran)	1 Dokumen	412.485.000	
	Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan			
7	Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Tengah	1 Rekomendasi Kebijakan	852.045.000	
8	Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur	1 Rekomendasi Kebijakan	720.177.000	
9	Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Barat	1 Rekomendasi Kebijakan	697.634.000	
018.12	Badan Karantina Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	SDM Aparatur Sipil Negara Karantina Pertanian yang Kompeten dan Profesional			
1	Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Ahli	1 Kegiatan	2.543.492.000	
2	Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Medik Veteriner	1 Kegiatan	2.543.492.000	
3	Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil	1 Kegiatan	2.821.894.000	
4	Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner	1 Kegiatan	2.821.894.000	
	Pengembangan Teknik dan Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati			
5	Uji Terap Teknik dan Metode KP	1 Dokumen	120.932.000	
	Pengembangan Teknik dan Metoda Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati			
6	Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium	1 Dokumen	118.335.000	
7	Validasi Metode Pengujian Laboratorium	1 Dokumen	110.085.000	
8	Koleksi Standar HPH/HPIIK	1 Dokumen	25.500.000	
9	Koleksi Standar OPT/OPTK	1 Dokumen	25.500.000	

6 *an*

Kementerian Negara/Lembaga: Perindustrian (019)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
019.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi			
	1 Penyelenggaraan Diklat Operator Mesin Industri Garmen Sistem 3 in 1 selama 20 Hari	1 Orang	6.500.000	
	2 Penyelenggaraan Diklat Operator Sektor Alas Kaki Sistem 3 in 1 selama 20 Hari	1 Orang	6.500.000	

6 An

Kementerian Negara/Lembaga: Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
020.12	Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Jumlah NSPK Diklat Yang Ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM			
	1 Penyusunan, Pembakuan dan Penyempurnaan Materi Uji Kompetensi (MUK)	40 Dokumen	317.402.000	
	2 Penyusunan, Pembakuan dan Penyempurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP)	20 Dokumen	139.522.000	
	3 Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi	20 Dokumen	274.485.000	
	4 Penyusunan dan Penyempurnaan Bahan Ajar dan Kurikulum Diklat Bidang Migas	20 Dokumen	513.682.000	
	5 Penyusunan Modul Diklat Aparatur Bidang Migas	20 Dokumen	350.454.000	
	6 Penyusunan Modul Diklat Industri Bidang Migas	30 Dokumen	441.947.000	
	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi			
	7 Diklat Teknis Bidang Minerba Durasi 5 Hari di Bandung	1 Diklat	96.200.000	
	8 Diklat Fungsional Inspektur Tambang Pertama di Bandung	1 Diklat	1.349.140.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi			
	9 Iptek Bagi Masyarakat	1 Laporan	63.161.000	
	10 Iptek Bagi Kewirausahaan	1 Laporan	90.833.000	
	Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas			
	11 Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas	1 Orang	75.408.431	
	Penelitian Yang Dilaksanakan			
	12 Penelitian Dosen Pemula	1 Judul	14.964.000	
	13 Penelitian Fundamental	1 Judul	73.949.000	
	14 Penelitian Unggulan	1 Judul	104.245.000	
	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Dalam Satu Tahun			
	15 Diklat Teknis 48 JP Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE	1 Diklat	119.882.000	
	16 Diklat Teknis 96 JP Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE	1 Diklat	193.866.000	

4 Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Perhubungan (022) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Laporan Hasil Kajian Kelompok				
	1 Studi Sedang Transportasi Antarmoda	1	Laporan	565.591.000	Dilaksanakan 6 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Kajian Perorangan				
	2 Studi Kecil Transportasi Antarmoda	1	Laporan	80.000.000	Dilaksanakan 3 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Penelitian Swakelola				
	3 Studi Besar Transportasi Antarmoda	1	Laporan	999.441.000	Dilaksanakan 10 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Kajian Kelompok				
	4 Studi Sedang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1	Laporan	565.591.000	Dilaksanakan 6 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Kajian Perorangan				
	5 Studi Kecil Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1	Laporan	80.000.000	Dilaksanakan 3 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Penelitian Swakelola				
	6 Studi Besar Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1	Laporan	999.441.000	Dilaksanakan 10 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Kajian Kelompok				
	7 Studi Sedang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	Laporan	565.591.000	Dilaksanakan 6 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Kajian Perorangan				
	8 Studi Kecil Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	Laporan	80.000.000	Dilaksanakan 3 Bulan Kalender
	Laporan Hasil Penelitian Swakelola				
	9 Studi Besar Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	Laporan	999.441.000	Dilaksanakan 10 Bulan Kalender
	Laporan Kajian Kelompok				
	10 Studi Sedang Transportasi Udara	1	Laporan	565.591.000	Dilaksanakan 6 Bulan Kalender
	Laporan Kajian Perorangan				
	11 Studi Kecil Transportasi Udara	1	Laporan	80.000.000	Dilaksanakan 3 Bulan Kalender
	Laporan Penelitian Swakelola				
	12 Studi Besar Transportasi Udara	1	Laporan	999.441.000	Dilaksanakan 10 Bulan Kalender
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	Lulusan Diklat Teknis				
	1 Diklat Calon Purna Bhakti PNS Kementerian Perhubungan - Jawa Barat	30	Orang	258.968.000	1 Angkatan 10 Hari
	2 Diklat Teknis Transportasi Tingkat IV - Jawa Barat	30	Orang	261.614.000	1 Angkatan 12 Hari
	3 Diklat Teknis Transportasi Tingkat III - Jawa Barat	30	Orang	267.216.000	1 Angkatan 12 Hari
	4 Diklat Budaya Keselamatan Transportasi - Jawa Barat	30	Orang	263.466.000	1 Angkatan 12 Hari
	5 Diklat Evakuasi Keadaan Darurat - Jawa Barat	30	Orang	299.036.000	1 Angkatan 10 Hari
	6 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM - Jawa Barat	30	Orang	33.108.000	1 Angkatan 1 Hari
	7 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM Transportasi Tingkat Manajerial - Jawa Barat	30	Orang	231.794.000	1 Angkatan 3 Hari
	8 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM Transportasi Tingkat Pelaksana - Jawa Barat	30	Orang	310.188.000	1 Angkatan 6 Hari
	9 Diklat Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna Tingkat SLTP BPSDM - Jawa Barat	30	Orang	307.450.000	1 Angkatan 15 Hari

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

[illegible]

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	32 Diklat Teknis Administrasi selama 10 Hari (Pusdiklat Administrasi)	1 Orang	8.111.333	
	33 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 12 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	5.447.333	
	34 DDTK Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administasi 4 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	3.380.000	
	35 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	4.732.000	
	36 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 8 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	4.016.666	
	37 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	3.189.666	
	38 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 12 Hari (BDK Medan)	1 Orang	5.161.733	
	39 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 7 Hari (BDK Medan)	1 Orang	3.199.733	
	40 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Medan)	1 Orang	3.453.866	
	41 Alumni Diklat Administrasi 7 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	3.585.428	
	42 Alumni Diklat Administrasi 6 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	3.211.142	
	43 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	2.916.428	
	44 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.187.857	
	45 Diklat Teknis Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (BDK Denpasar)	1 Orang	5.041.818	
	46 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. Bali (BDK Denpasar)	1 Orang	2.195.142	
	47 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. NTB (BDK Denpasar)	1 Orang	2.546.571	
	48 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. NTT (BDK Denpasar)	1 Orang	2.886.571	
	49 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	4.787.700	
	50 Diklat Tenaga Administrasi 7 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	5.750.500	
	51 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	5.776.200	
	52 Diklat Tenaga Administrasi 4 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	3.054.333	
	53 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Makassar)	1 Orang	6.650.500	
	54 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BDK Makassar)	1 Orang	4.812.200	
	55 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Makassar)	1 Orang	5.684.700	
	56 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulsel (BDK Makassar)	1 Orang	2.142.000	
	57 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulteng (BDK Makassar)	1 Orang	2.351.500	
	58 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sultra (BDK Makassar)	1 Orang	2.257.750	
	59 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulbar (BDK Makassar)	1 Orang	2.175.250	
	60 Alumni Diklat dan Ujian Sertifikasi Pbjp (BDK Makassar)	1 Orang	5.861.666	
	61 Alumni Diklat Reguler Tenaga Teknis Administrasi (BDK Manado)	1 Orang	8.697.500	
	62 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 12 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	7.102.000	
	63 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	6.465.333	
	64 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	5.815.333	
	65 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	4.735.000	
	66 Alumni Diklat Di Tempat Kerja (ddtk) (BDK Ambon)	1 Orang	4.251.333	
	67 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 13 Hari (BDK Padang)	1 Orang	5.936.000	
	68 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Padang)	1 Orang	5.106.000	
	69 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Padang)	1 Orang	4.409.333	
	70 Diklat Tenaga Teknis Administrasi Di Tempat Kerja 4 Hari (BDK Semarang)	1 Orang	1.837.857	
	71 Diklat Barang dan Jasa 6 Hari (BDK Semarang)	1 Orang	3.831.428	
	72 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	2.869.666	
	73 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	4.119.666	
	Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan			
	74 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	4.505.333	
	75 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	5.578.333	
	76 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 12 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	6.293.666	
	77 DDTK Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	5.572.666	
	78 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 14 Hari (BDK Medan)	1 Orang	5.872.133	
	79 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 10 Hari (BDK Medan)	1 Orang	4.159.666	
	80 Alumni Diklat Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	5.900.857	
	81 Diklat Teknis Keagamaan Substantif 10 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	4.586.571	
	82 Alumni Diklat Teknis Fungsional Keagamaan Berjenjang Di Dalam Kampus 17 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	8.136.000	
	83 Alumni Diklat Teknis Fungsional Keagamaan Berjenjang Di Dalam Kampus 14 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	6.858.000	

Abu

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	84 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Dalam Kampus 11 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	5.901.333	
	85 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Dalam Kampus 8 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	4.623.333	
	86 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. DKI Jakarta 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	2.615.666	
	87 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. Banten 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	2.990.666	
	88 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. Kalimantan Barat 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	3.674.000	
	89 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Pertama 15 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	5.716.428	
	90 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Muda 12 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.745.000	
	91 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.187.857	
	92 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	2.229.428	
	93 Alumni Diklat Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	8.182.285	
	94 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Keagamaan 10 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	6.796.571	
	95 Diklat Teknis Fungsional 10 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	6.243.000	
	96 Diklat Teknis Fungsional 12 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	6.589.666	
	97 Diklat Teknis Fungsional 15 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	7.395.233	
	98 Diklat Teknis Substantif 10 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	6.243.000	
	99 Diklat Teknis Substantif 12 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	6.589.666	
	100 Diklat Teknis Substantif 15 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	7.395.233	
	101 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 7 Hari (BDK	1 Orang	5.408.133	
	102 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 10 Hari (BDK	1 Orang	6.748.100	
	103 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 12 Hari (BDK	1 Orang	7.463.100	
	104 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulsel (BDK Makassar)	1 Orang	2.500.750	
	105 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulteng (BDK Makassar)	1 Orang	2.702.750	
	106 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sultra (BDK Makassar)	1 Orang	2.610.250	
	107 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulbar (BDK Makassar)	1 Orang	2.531.500	
	108 Diklat Tenaga Teknis Fungsional Keagamaan Tingkat Dasar (BDK Manado)	1 Orang	10.455.833	
	109 Diklat Tenaga Teknis Fungsional Keagamaan Tingkat Menengah (BDK Manado)	1 Orang	9.209.166	
	110 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Manado)	1 Orang	8.697.500	
	111 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Manado)	1 Orang	7.596.666	
	112 Alumni Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Keagamaan (BDK Ambon)	1 Orang	9.318.333	
	113 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 15 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	7.900.000	
	114 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang (10 Hari) (BDK Ambon)	1 Orang	6.220.000	
	115 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan (10 Hari) (BDK Ambon)	1 Orang	6.213.333	
	116 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 12 Hari (BDK Padang)	1 Orang	5.526.666	
	117 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 15 Hari (BDK Padang)	1 Orang	6.656.666	
	118 Diklat Teknis Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Semarang)	1 Orang	5.568.000	
	119 Diklat Teknis Fungsional Keagamaan 10 Hari (BDK Semarang)	1 Orang	4.074.285	
	120 Diklat Teknis Substantif Keagamaan 10 Hari (BDK Semarang)	1 Orang	3.980.000	
	121 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Pertama 15 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	5.603.000	
	122 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Muda 12 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	4.703.000	
	123 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	4.119.666	
	124 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan Di Luar Kampus 5 Hari (BDK Bandung)	1 Orang	2.545.500	
	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan			
	125 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	4.505.333	
	126 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 10 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	5.578.333	
	127 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 12 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	6.293.666	
	128 DITK Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Aceh)	1 Orang	5.572.666	
	129 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 15 Hari (BDK Medan)	1 Orang	6.192.333	
	130 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BDK Medan)	1 Orang	5.136.733	
	131 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 10 Hari (BDK Medan)	1 Orang	4.459.666	
	132 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 Hari (BDK Medan)	1 Orang	3.203.066	
	133 Alumni Diklat Teknis Pendidikan Fungsional 12 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	5.120.857	
	134 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 10 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	4.586.571	
	135 Diklat Teknis Pendidikan Substantif 10 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	4.586.571	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	136 Diklat Substantif Pendidikan 7 Hari (BDK Palembang)	1 Orang	3.978.000	
	137 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Lampung (BDK Palembang)	1 Orang	3.069.714	
	138 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Bengkulu (BDK Palembang)	1 Orang	3.204.028	
	139 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Bangka Belitung (BDK Palembang)	1 Orang	3.439.714	
	140 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Sumatera Selatan (BDK Palembang)	1 Orang	2.916.857	
	141 Alumni Diklat Teknis Fungsional Pendidikan Berjenjang Di Dalam Kampus 17 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	8.136.000	
	142 Alumni Diklat Teknis Fungsional Pendidikan Berjenjang Di Dalam Kampus 14 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	6.858.000	
	143 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Dalam Kampus 11 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	5.901.333	
	144 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. DKI Jakarta 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	2.615.666	
	145 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Kota Adm. Kepulauan Seribu 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	3.015.666	
	146 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. Banten 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	3.024.000	
	147 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. Kalimantan Barat 5 Hari (BDK Jakarta)	1 Orang	3.690.666	
	148 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.745.000	
	149 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Menengah 10 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.187.857	
	150 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	4.187.857	
	151 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Surabaya)	1 Orang	2.229.428	
	152 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kependidikan 12 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	7.419.428	
	153 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kependidikan 10 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	6.796.571	
	154 Alumni Diklat Teknis Substantif Penugasan Tambahan 10 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	6.796.571	
	155 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 7 Hari (BDK Denpasar)	1 Orang	5.375.142	
	156 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. Bali (BDK Denpasar)	1 Orang	2.529.500	
	157 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. NTB (BDK Denpasar)	1 Orang	3.024.500	
	158 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. NTT (BDK Denpasar)	1 Orang	3.399.500	
	159 Diklat Teknis Fungsional 10 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	6.130.533	
	160 Diklat Teknis Fungsional 12 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	7.253.666	
	161 Diklat Tenaga Teknis Substantif 5 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	3.881.666	
	162 Diklat Tenaga Teknis Substantif 7 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	5.025.333	
	163 Diklat Teknis Substantif 10 Hari (BDK Banjarmasin)	1 Orang	5.775.333	
	164 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 Hari (BDK)	1 Orang	5.408.133	
	165 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 10 Hari (BDK)	1 Orang	6.748.100	
	166 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulsel (BDK Makassar)	1 Orang	2.500.750	
	167 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulteng (BDK Makassar)	1 Orang	2.702.750	
	168 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sultra (BDK Makassar)	1 Orang	2.610.250	
	169 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulbar (BDK Makassar)	1 Orang	2.531.500	
	170 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BDK)	1 Orang	7.463.100	
	171 Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang Tingkat Dasar (BDK Manado)	1 Orang	9.209.166	
	172 Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang Tingkat Menengah (BDK Manado)	1 Orang	8.697.500	
	173 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 10 Hari (BDK Manado)	1 Orang	8.697.500	
	174 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 7 Hari (BDK Manado)	1 Orang	7.596.666	
	175 Alumni Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pendidikan 15 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	8.080.333	
	176 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 12 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	7.075.333	
	177 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 10 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	6.548.666	
	178 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 7 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	5.128.333	
	179 Alumni Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	6.520.333	
	180 Alumni Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) 5 Hari (BDK Ambon)	1 Orang	4.834.666	
	181 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 10 Hari (BDK Padang)	1 Orang	5.073.333	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	182 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 12 Hari (BDK Padang)	1	Orang	5.526.666	
	183 Alumni Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik 7 Hari (BDK Padang)	1	Orang	4.182.666	
	184 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 12 Hari (BDK Semarang)	1	Orang	4.733.142	
	185 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 10 Hari (BDK Semarang)	1	Orang	4.065.714	
	186 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan 10 Hari (BDK Semarang)	1	Orang	3.894.285	
	187 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Semarang)	1	Orang	2.654.000	
	188 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Semarang)	1	Orang	2.129.285	
	189 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari (BDK Bandung)	1	Orang	4.703.000	
	190 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Menengah 10 Hari (BDK Bandung)	1	Orang	4.124.666	
	191 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Bandung)	1	Orang	4.124.666	
	192 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Luar Kampus 5 Hari (BDK Bandung)	1	Orang	2.548.833	

CA Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Ketenagakerjaan (026)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
026.04	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Pemberdayaan Melalui Kegiatan Padat Karya 1 Padat Karya Produktif Wilayah Barat dan Tengah 2 Padat Karya Produktif Wilayah Timur 3 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Barat 4 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Tengah 5 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Timur Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri Untuk Penciptaan Wirausaha Baru 6 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri Untuk Penciptaan Wirausaha Baru Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Tentang Sektor Jasa dan Industri Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur 7 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Terapan Tentang Sektor Jasa dan Industri Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur 8 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Terapan Tentang Sektor Pertanian dan Maritim Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	1.201.666 1.279.393 1.681.022 1.803.750 1.984.090 1.635.000 2.120.000 2.120.000	1 Paket 66 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha 1 Paket 66 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Peserta Program 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Sarana Usaha 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Sarana Usaha
026.05	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI	1 Perjanjian Bersama (PB)	3.500.000	
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) LSP Terlisensi 1 Asesmen 2 Witness LSP Peserta Pemagangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi 3 Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	1 Lembaga 1 Lembaga 1 Orang	7.552.000 7.552.000 6.183.000	1 Angkatan untuk 10 Orang

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.04	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	1 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra "Insyat" Sumut	1 Orang	21.600.000	
	2 Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor	1 Orang	21.605.184	
	3 Penyandang Disabilitas Sensorik yang menerima Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta	1 Orang	20.459.875	
	4 Penyandang Disabilitas Sensorik yang menerima Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang	1 Orang	24.341.400	
	5 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu	1 Orang	15.703.125	
	6 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi	1 Orang	16.531.572	
	7 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru	1 Orang	17.373.428	
	8 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna" Bandung	1 Orang	15.367.674	
	9 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Tan Miyat" Bekasi	1 Orang	16.528.823	
	10 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou" Manado	1 Orang	17.063.240	
	11 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan Bali	1 Orang	16.645.000	
	12 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita "Ciungwanara" Bogor	1 Orang	17.974.000	
	13 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung	1 Orang	15.925.886	
	14 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu	1 Orang	20.408.542	
	15 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa "Cibinong" Bogor	1 Orang	24.626.317	
	16 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta	1 Orang	18.289.483	
	17 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang	1 Orang	21.118.035	
	18 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya" Makassar	1 Orang	16.257.591	

h Agn

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	19 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari	1 Orang	23.178.142	
	20 Wanita Tuna Sosial Yang Mendapatkan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta	1 Orang	14.970.437	
	21 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi (SBK)	1 Orang	8.514.110	
	22 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani" Jakarta	1 Orang	16.429.341	
	23 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang	1 Orang	16.593.571	
	24 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopuli" Makassar	1 Orang	18.103.000	
	25 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram	1 Orang	15.327.928	
	26 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus" Jakarta	1 Orang	9.448.818	
	27 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai" Pekanbaru	1 Orang	10.786.928	
	28 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang	1 Orang	14.544.750	
	29 Anak terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi	1 Orang	15.867.000	
	30 Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Aceh	1 Orang	15.703.500	
	31 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha "Budhi Dharma" Bekasi	1 Orang	15.989.054	
	32 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Maba'ji" Gowa	1 Orang	17.854.873	
	33 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari	1 Orang	19.247.957	
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Hasil Penelitian Terapan			
	1 Laporan Hasil Penelitian Terapan Kajian/Evaluasi Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	1.293.770.000	
	2 Laporan Hasil Penelitian Terapan <i>Research and Development</i> Tahap I	1 Laporan	1.432.020.000	
	3 Laporan Hasil Penelitian Terapan <i>Research and Development</i> Tahap II	1 Laporan	1.501.700.000	
	4 Laporan Hasil Penelitian Terapan Diseminasi Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	1.069.790.000	
	Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial			
	5 Laporan Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	934.260.000	
	6 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	965.780.000	
	7 Laporan Penelitian <i>Quick Survei</i> Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	194.584.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang			
	8 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (40 jpl/5 hari)	1 Orang	4.866.533	

Agar

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	
	9 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (60 jpl/7 hari)	1	Orang	5.939.733	
	10 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (80 jpl/10 hari)	1	Orang	8.543.533	
	11 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (100 jpl/12 hari)	1	Orang	9.746.066	
	12 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (120 jpl/14 hari)	1	Orang	10.906.266	
	13 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (145 jpl/16 hari)	1	Orang	11.240.966	
	14 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (190 jpl/23 hari)	1	Orang	15.550.333	
	15 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (210 jpl/25 hari)	1	Orang	16.749.866	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung				
	16 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (104 jpl/12 hari)	1	Orang	8.637.233	
	17 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (40jpl/5 hari)	1	Orang	4.558.333	
	18 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (80 jpl/10 hari)	1	Orang	7.747.100	
	19 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (100 jpl/12 hari)	1	Orang	8.471.900	
	20 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (120 jpl/14 hari)	1	Orang	9.350.366	
	21 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (210 jpl/25 hari)	1	Orang	15.954.300	
	22 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (145 jpl/17 hari)	1	Orang	13.032.500	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta				
	23 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 100 jpl, 12 hari	1	Orang	8.756.633	
	24 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 80 jpl, 10 hari	1	Orang	7.927.766	
	25 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 210 jpl, 25 hari	1	Orang	16.336.000	
	26 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 120 jpl, 16 hari	1	Orang	10.146.033	
	27 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 40 jpl, 5 hari	1	Orang	5.219.100	
	28 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 145 jpl, 17 hari	1	Orang	13.187.133	
	29 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 60 jpl, 7 hari	1	Orang	6.017.966	
	30 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 80 jpl, 10 hari	1	Orang	8.431.633	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Banjarmasin				
	31 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (40 Jamlat/5 Hari)	1	Orang	6.326.166	
	32 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (60 Jamlat/7 Hari)	1	Orang	7.465.500	
	33 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (80 Jamlat/10 Hari)	1	Orang	8.836.000	

h Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	34 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (100 Jamlat / 12 Hari)	1	Orang	9.646.333	
	35 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (120 Jamlat / 14 Hari)	1	Orang	10.456.666	
	36 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (145 Jamlat / 17 Hari)	1	Orang	14.049.666	
	37 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (210 Jamlat / 25 Hari)	1	Orang	15.841.500	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Makassar				
	38 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (210 jpl/25 hari)	1	Orang	18.965.933	
	39 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (145 jpl/ 17 hari)	1	Orang	13.573.166	
	40 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (120 jpl/ 15 hari)	1	Orang	11.619.266	
	41 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (100 jpl/ 12 hari)	1	Orang	10.354.333	
	42 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (80 jpl/ 10 hari)	1	Orang	9.449.933	
	43 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (60 jpl / 7 hari)	1	Orang	8.021.333	
	44 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (60 jpl/ 7 hari/ pra)	1	Orang	11.664.133	
	45 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (40 jpl/ 5 hari)	1	Orang	7.101.933	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura				
	46 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (210 jamlat/25 hari)	1	Orang	25.944.166	
	47 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (100 jamlat/ 12 hari)	1	Orang	15.479.433	
	48 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (80 jamlat/ 10 hari)	1	Orang	14.225.833	
	49 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (60 jamlat/ 7 hari)	1	Orang	12.637.100	
	50 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (40 jamlat/ 5 hari)	1	Orang	10.764.166	
	51 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (145 jamlat/ 17 hari)	1	Orang	18.940.933	
	Pekerja Sosial yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial				
	52 TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Orang	14.578.933	
	53 TOF Pendamping PKH	1	Orang	14.973.266	
	54 TOF Operator PKH	1	Orang	14.093.666	
	55 TOF FDS PKH	1	Orang	23.786.800	
	Pegawai dan TKSK yang Telah Mengikuti Diklat Kesejahteraan Sosial				
	56 Pegawai dan TKSK Yang Telah Mengikuti Diklat Operator / Pendamping PKH	1	Orang	9.138.933	

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Sertifikasi			
57	Pekerja Sosial dan Tenaga Kcsejahteraan Sosial Mendapatkan Sertifikasi	1 Orang	6.128.750	
	Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi			
58	Lembaga Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Akreditasi	1 Lembaga	17.540.000	
	Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial			
59	Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial	1 Orang	5.975.171	
	Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pekerjaan Sosial			
60	Mahasiswa Program Pascasarjana (SP-1) Pekerjaan Sosial	1 Orang	18.037.840	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Sosial			
61	Penyuluhan Sosial Keliling Penyelenggaraan Program Kesos (<i>car free day</i>)	1 Lokasi	23.081.500	

C. 16W

Kementerian Negara/Lembaga: Pariwisata (040)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
040.01	Kementerian Pariwisata				
	Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata				
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
	1 Penelitian Individu	1 Dokumen	12.314.000		
	2 Penelitian Kelompok	1 Dokumen	147.773.000		
	3 Penelitian Lembaga/Institusi	1 Dokumen	443.982.000		
	4 Sertifikasi Profesi	1 Orang	403.000		

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
054.01	Badan Pusat Statistik				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	1 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah I	68	Laporan	2.860.879.000	
	2 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah II	69	Laporan	3.062.382.000	
	3 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah III	68	laporan	2.765.689.000	

6 am

(dalam rupiah)

✓ Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	Sertipikat Redistribusi Tanah				
	18 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori I	1	Bidang	917.480	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	19 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori II	1	Bidang	771.727	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
	20 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori III	1	Bidang	652.317	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
	21 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori IV	1	Bidang	530.402	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
	22 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori V	1	Bidang	401.180	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
	23 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori I	1	Bidang	1.145.650	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	24 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori II	1	Bidang	962.549	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
	25 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori III	1	Bidang	803.549	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
	26 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori IV	1	Bidang	646.649	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
	27 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori V	1	Bidang	479.150	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
	28 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori I	1	Bidang	1.295.462	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	29 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori II	1	Bidang	1.090.401	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
	30 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori III	1	Bidang	915.526	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
	31 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori IV	1	Bidang	735.551	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
	32 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori V	1	Bidang	547.407	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
	Bidang Tanah Yang Diinventarisasi				
	33 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori I	1	Bidang	173.908	NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan
	34 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori II	1	Bidang	136.084	Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra

L. Aon

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	35 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori III	1 Bidang	108.125	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel
	36 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori IV	1 Bidang	103.177	Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali
	37 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori I	1 Bidang	266.400	NTT, Maluku, Maluku, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan
	38 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori II	1 Bidang	213.700	Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra
	39 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori III	1 Bidang	202.800	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel
	40 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori IV	1 Bidang	209.000	Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali
	Neraca Penatagunaan Tanah			
	41 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori I	1 Neraca	118.350.000	Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara
	42 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori II	1 Neraca	98.388.000	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra
	43 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori III	1 Neraca	93.160.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung
	44 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori IV	1 Neraca	103.826.000	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali
	45 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori I	1 Neraca	70.500.000	Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara
	46 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II	1 Neraca	62.600.000	Sulut, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTT, NTB, Gorontalo
	47 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori III	1 Neraca	61.750.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Lampung
	48 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Neraca	61.950.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Sertipikat Konsolidasi Tanah			
	49 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	2.046.120	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	50 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	1.735.900	Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri,Babel
	51 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	1.597.900	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng
	52 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	1.398.660	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Gorontalo
	53 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	1.302.120	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
	54 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori VI	1 Bidang	2.486.380	Wilayah Kepulauan
	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah			
	55 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori I	1 Bidang	114.831.000	Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,Papua
	56 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori II	1 Bidang	95.322.000	NTT, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra
	57 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori III	1 Bidang	93.717.000	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel
	58 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Bidang	88.302.000	Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali

Abn

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta			
	1 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jakarta)	1 Dokumen	6.700.000	
	2 Observasi dan Monitoring dan Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	57.928.000	
	3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	22.100.000	
	4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	61.178.000	
	5 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.700.000	
	6 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	58.278.000	
	7 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.700.000	
	8 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	13.290.000	
	9 Tindaklanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	6.700.000	
	10 Ujian Amatir Radio	1 Dokumen	37.460.000	
	11 Joint Measurement & Inspeksi Di Pelabuhan Penggunaan Frekuensi Maritim Dengan Ditjen Hubla /Otoritas Pelabuhan	1 Dokumen	20.155.000	
	12 Joint Measurement & Inspeksi Di Bandara Halim Penggunaan Frekuensi Penerbangan Dengan Ditjen Hubud / Otoritas Bandara	1 Dokumen	20.120.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan			
	13 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.440.000	
	14 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	17.800.000	
	15 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	10.140.000	
	16 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	32.615.000	
	17 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.515.000	
	18 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.336.000	
	19 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.336.000	
	20 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Dokumen	9.740.000	
	21 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Dokumen	20.775.000	
	22 Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Dokumen	33.690.000	
	23 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Dokumen	85.275.000	
	24 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Dokumen	33.802.000	
	25 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Dokumen	33.802.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung			
	26 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Dalam Kota]	1 Dokumen	5.899.000	
	27 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Luar Kota]	1 Dokumen	24.870.000	
	28 Penertiban Frekuensi Radio [Dalam Kota]	1 Dokumen	25.056.000	
	29 Penertiban Frekuensi Radio [Luar Kota]	1 Dokumen	66.560.000	
	30 Validasi Data Frekuensi Radio [Dalam Kota]	1 Dokumen	4.570.000	
	31 Validasi Data Frekuensi Radio [Luar Kota]	1 Dokumen	29.367.000	
	32 Pengukuran Frekuensi Radio	1 Dokumen	24.845.000	
	33 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	29.729.000	
	34 Ujian Negara Amatir Radio [UNAR]	1 Dokumen	62.898.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang			
	35 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Dokumen	4.824.000	
	36 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang)	1 Dokumen	20.596.000	
	37 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Dokumen	19.450.000	
	38 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang)	1 Dokumen	52.100.000	
	39 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Dokumen	4.824.000	
	40 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang)	1 Dokumen	20.596.000	
	41 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.824.000	
	42 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.596.000	
	43 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	31.924.000	
	44 Ujian Amatir Radio	1 Dokumen	62.323.000	

Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya			
45	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.312.000	
46	Obseivasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	22.700.000	
47	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim)	1 Dokumen	22.165.000	
48	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim)	1 Dokumen	76.850.000	
49	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	32.135.000	
50	Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim)	1 Dokumen	5.792.000	
51	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim)	1 Dokumen	21.660.000	
52	Ujian Amatir Radio	1 Dokumen	93.125.000	
53	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Dokumen	5.825.000	
54	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.725.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda			
55	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Dokumen	6.200.000	
56	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Darat	1 Dokumen	27.750.000	
57	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara	1 Dokumen	38.830.000	
58	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara	1 Dokumen	41.830.000	
59	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Dokumen	19.749.000	
60	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	82.763.000	
61	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Dokumen	6.200.000	
62	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Dokumen	27.750.000	
63	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara	1 Dokumen	38.830.000	
64	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara	1 Dokumen	41.830.000	
65	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Dokumen	6.200.000	
66	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda	1 Dokumen	38.830.000	
67	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	18.531.000	
68	Ujian Negara Amatir Radio	1 Dokumen	60.705.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar			
69	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota Makassar	1 Dokumen	5.000.000	
70	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Dokumen	24.400.000	
71	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.400.000	
72	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Dokumen	16.520.000	
73	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Dokumen	66.790.000	
74	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Dokumen	5.155.000	
75	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Dokumen	22.900.000	
76	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Dokumen	21.400.000	
77	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Dokumen	22.900.000	
78	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Dokumen	21.400.000	
79	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Dokumen	5.000.000	
80	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	14.500.000	
81	Ujian Negara Amatir Radio	1 Dokumen	100.500.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru			
82	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.825.000	
83	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	24.187.000	
84	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	20.175.000	
85	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	67.205.000	
86	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	23.810.000	
87	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	20.400.000	
88	Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam Kota	1 Dokumen	5.720.000	
89	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Dokumen	19.750.000	

6 Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
90	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut	1 Dokumen	117.010.000	
91	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut	1 Dokumen	44.750.000	
92	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Dokumen	29.230.000	
93	Pengukuran Rekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.175.000	
94	Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Dokumen	44.750.000	
95	Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang	1 Dokumen	92.560.000	
96	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang)	1 Dokumen	5.575.000	
97	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang)	1 Dokumen	19.325.000	
98	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang)	1 Dokumen	21.440.000	
99	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang)	1 Dokumen	65.250.000	
100	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.250.000	
101	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	19.000.000	
102	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Dokumen	19.325.000	
103	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	59.816.000	
104	Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta	1 Dokumen	53.170.000	
105	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Dokumen	4.510.000	
106	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Dokumen	10.163.000	
107	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Dokumen	19.788.000	
108	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Dokumen	34.788.000	
109	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Dokumen	3.840.000	
110	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Dokumen	8.240.000	
111	Pengukuran Frekuensi Radio (D.I. Yogyakarta)	1 Dokumen	12.260.000	
112	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D.I. Yogyakarta)	1 Dokumen	31.900.000	
113	Ujian Negara Amatir Radio (D.I.Yogyakarta) Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar	1 Dokumen	30.056.000	
114	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Dokumen	6.560.000	
115	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Badung)	1 Dokumen	27.635.000	
116	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Dokumen	24.565.000	
117	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Badung)	1 Dokumen	83.123.000	
118	Validasi Data Frekuensi Dalam Kota (Badung)	1 Dokumen	6.875.000	
119	Validasi Data Frekuensi Luar Kota (Badung)	1 Dokumen	28.510.000	
120	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Dokumen	31.820.000	
121	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	65.410.000	
122	Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang	1 Dokumen	46.815.000	
123	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.600.000	
124	Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Darat	1 Dokumen	23.750.000	
125	Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Dokumen	38.300.000	
126	Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Dokumen	20.570.000	
127	Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Dokumen	30.670.000	
128	Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Dokumen	48.120.000	
129	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Dokumen	5.900.000	
130	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Dokumen	23.400.000	
131	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Dokumen	38.300.000	
132	Pengukuran Stasiun Radio Dalam Kota Kupang	1 Dokumen	5.900.000	

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	133 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1	Dokumen	34.900.000	
	134 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1	Dokumen	38.300.000	
	135 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang	1	Dokumen	9.670.000	
	136 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat NTT	1	Dokumen	18.620.000	
	137 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara NTT	1	Dokumen	25.790.000	
	138 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado	1	Dokumen	99.980.000	
	139 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Dalam Kota	1	Dokumen	4.950.000	
	140 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Luar Kota	1	Dokumen	44.200.000	
	141 Operasi Penertiban Frekrad Dalam Kota	1	Dokumen	24.275.000	
	142 Operasi Penertiban Frekrad Luar Kota	1	Dokumen	68.270.000	
	143 Validasi Data Pengguna Frekrad Dalam Kota	1	Dokumen	4.950.000	
	144 Validasi Data Pengguna Frekrad Luar Kota	1	Dokumen	23.465.000	
	145 Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	20.680.000	
	146 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	35.400.000	
	147 Ujian Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura	1	Dokumen	33.685.000	
	148 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	7.402.000	
	149 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1	Dokumen	16.360.000	
	150 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1	Dokumen	50.240.000	
	151 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1	Dokumen	53.824.000	
	152 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	20.730.000	
	153 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1	Dokumen	110.524.000	
	154 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	7.402.000	
	155 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1	Dokumen	16.360.000	
	156 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1	Dokumen	50.240.000	
	157 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1	Dokumen	53.825.000	
	158 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	7.527.000	
	159 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1	Dokumen	48.650.000	
	160 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	14.805.000	
	161 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota (Papua)	1	Dokumen	71.425.000	
	162 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua)	1	Dokumen	12.810.000	
	163 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua)	1	Dokumen	46.745.000	
	164 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua) Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh	1	Dokumen	23.860.000	
	165 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1	Dokumen	4.350.000	
	166 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1	Dokumen	21.150.000	
	167 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut (Aceh)	1	Dokumen	22.085.000	
	168 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1	Dokumen	53.378.000	
	169 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh)	1	Dokumen	4.200.000	
	170 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1	Dokumen	31.087.000	
	171 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh)	1	Dokumen	4.350.000	
	172 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1	Dokumen	21.330.000	
	173 Tindak Lanjut Hasil Penertiban (Aceh)	1	Dokumen	35.278.000	
	174 Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	34.417.000	
	175 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1	Dokumen	20.300.000	
	176 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Menggunakan Kapal Laut (Aceh)	1	Dokumen	21.570.000	

Abw

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam				
177	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan BBM	1	Dokumen	3.412.000	
178	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1	Dokumen	18.648.000	
179	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1	Dokumen	33.648.000	
180	Monitoring Bordercomm (UPT Perbatasan)	1	Dokumen	18.648.000	
181	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	27.120.000	
182	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	60.826.000	
183	Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan BBM	1	Dokumen	4.950.000	
184	Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1	Dokumen	24.374.000	
185	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1	Dokumen	33.124.000	
186	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	3.900.000	
187	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1	Dokumen	18.648.000	
188	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1	Dokumen	33.648.000	
189	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	39.360.000	
190	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1	Dokumen	37.063.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang				
191	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1	Dokumen	4.450.000	
192	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Padang	1	Dokumen	17.740.000	
193	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1	Dokumen	12.260.000	
194	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	29.340.000	
195	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1	Dokumen	2.970.000	
196	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Padang	1	Dokumen	17.640.000	
197	Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	14.298.000	
198	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	27.570.000	
199	Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	26.770.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jambi				
200	Observasi dan Monitoring Dalam Kota (Jambi)	1	Dokumen	5.720.000	
201	Observasi dan Monitoring Luar Kota (Jambi)	1	Dokumen	19.300.000	
202	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi)	1	Dokumen	18.152.000	
203	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi)	1	Dokumen	42.172.000	
204	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi)	1	Dokumen	5.720.000	
205	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi)	1	Dokumen	19.300.000	
206	Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	19.300.000	
207	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	8.390.000	
208	Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	56.550.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu				
209	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1	Dokumen	4.550.000	
210	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1	Dokumen	18.000.000	
211	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1	Dokumen	23.730.000	
212	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	18.190.000	
213	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1	Dokumen	42.650.000	
214	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu	1	Dokumen	10.195.000	
215	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1	Dokumen	4.550.000	
216	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1	Dokumen	18.000.000	
217	Pengukuran Frekuensi Radio Bengkulu	1	Dokumen	18.000.000	
218	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu	1	Dokumen	31.200.000	
219	Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu	1	Dokumen	53.200.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung				
220	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	5.150.000	
221	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	18.380.000	
222	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	11.340.000	
223	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	30.426.000	

Abm

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	224 Validasi Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.695.000	
	225 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	18.380.000	
	226 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	18.380.000	
	227 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	6.292.000	
	228 Ujian Negara Amatir Radio	1	Dokumen	25.360.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak				
	229 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak	1	Dokumen	5.910.000	
	230 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak	1	Dokumen	20.660.000	
	231 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara	1	Dokumen	34.545.000	
	232 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai	1	Dokumen	23.160.000	
	233 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak	1	Dokumen	24.455.000	
	234 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak	1	Dokumen	62.225.000	
	235 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Pontianak	1	Dokumen	5.910.000	
	236 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak	1	Dokumen	20.660.000	
	237 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai	1	Dokumen	23.160.000	
	238 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara dan Darat	1	Dokumen	34.545.000	
	239 Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	20.660.000	
	240 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	10.660.000	
	241 Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	60.052.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin				
	242 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin	1	Dokumen	5.550.000	
	243 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota	1	Dokumen	22.435.000	
	244 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota	1	Dokumen	17.980.000	
	245 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1	Dokumen	43.212.000	
	246 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota	1	Dokumen	5.550.000	
	247 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota	1	Dokumen	22.435.000	
	248 Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	22.255.000	
	249 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	19.230.000	
	250 Ujian Negara Amatir Radio	1	Dokumen	59.550.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya				
	251 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng)	1	Dokumen	3.447.000	
	252 Observasi Monitoring Bergerak Frekuensi di Luar Kota (Kalteng)	1	Dokumen	32.425.000	
	253 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng)	1	Dokumen	23.700.000	
	254 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng)	1	Dokumen	81.440.000	
	255 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng)	1	Dokumen	3.180.000	
	256 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng)	1	Dokumen	24.845.000	
	257 Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	24.845.000	
	258 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1	Dokumen	5.350.000	
	259 Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio	1	Dokumen	76.525.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram				
	260 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB]	1	Dokumen	5.760.000	
	261 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]	1	Dokumen	22.456.000	
	262 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1	Dokumen	23.258.000	
	263 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB]	1	Dokumen	24.981.000	
	264 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]	1	Dokumen	59.608.000	
	265 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air /Laut	1	Dokumen	56.422.000	
	266 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB]	1	Dokumen	5.760.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
267	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]	1 Dokumen	22.456.000	
268	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]	1 Dokumen	23.188.000	
269	Transportasi Penyeberangan Air/Laut			
269	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB]	1 Dokumen	5.760.000	
270	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]	1 Dokumen	22.456.000	
271	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Dokumen	23.188.000	
272	Tindak Lanjut Hasil Penertiban [NTB]	1 Dokumen	47.019.000	
273	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [NTB]	1 Dokumen	60.542.000	
274	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [NTB]	1 Dokumen	57.796.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapan			
275	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	5.275.000	
276	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	25.850.000	
277	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	22.605.000	
278	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	79.780.000	
279	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	5.335.000	
280	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	25.850.000	
281	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	5.275.000	
282	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	25.850.000	
283	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota	1 Dokumen	16.470.000	
284	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota	1 Dokumen	39.780.000	
285	Ujian Amatir Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	32.494.000	
286	Ujian Amatir Radio di Luar Kota	1 Dokumen	57.204.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu			
287	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	5.330.000	
288	Monitoring Observasi Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	21.430.000	
289	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transfortasi Laut	1 Dokumen	27.430.000	
290	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	61.250.000	
291	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.330.000	
292	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	21.430.000	
293	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	46.580.000	
294	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.330.000	
295	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.430.000	
296	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut	1 Dokumen	27.430.000	
297	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	40.830.000	
298	Ujian Amatir Radio	1 Dokumen	71.502.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Kendari			
299	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.050.000	
300	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.800.000	
301	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut	1 Dokumen	23.400.000	
302	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Melalui Udara	1 Dokumen	32.050.000	
303	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	28.860.000	
304	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	37.680.000	
305	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.050.000	
306	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui Darat	1 Dokumen	19.700.000	
307	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui	1 Dokumen	25.680.000	
308	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara	1 Dokumen	32.350.000	
309	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.050.000	
310	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Darat	1 Dokumen	21.800.000	
311	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut	1 Dokumen	23.800.000	
312	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara	1 Dokumen	30.300.000	
313	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	13.730.000	
314	Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	1 Dokumen	55.030.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke			
315	Observasi dan Monitoring Dalam Kota Merauke	1 Dokumen	8.800.000	
316	Observasi dan Monitoring Luar Kota Merauke	1 Dokumen	48.375.000	
317	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke	1 Dokumen	38.600.000	
318	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Merauke	1 Dokumen	148.300.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	319 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke	1	Dokumen	8.800.000	
	320 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	48.375.000	
	321 Pengukuran Frekuensi Radio	1	Dokumen	57.175.000	
	322 Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	171.820.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon				
	323 Observasi dan Monitoring Frekuensi Dalam Kota Ambon	1	Dokumen	4.200.000	
	324 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1	Dokumen	23.870.000	
	325 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1	Dokumen	21.605.000	
	326 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1	Dokumen	17.300.000	
	327 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1	Dokumen	27.674.000	
	328 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1	Dokumen	38.310.000	
	329 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1	Dokumen	4.200.000	
	330 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1	Dokumen	23.130.000	
	331 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1	Dokumen	21.605.000	
	332 Pengukuran Parameter Teknis Dalam Kota Ambon	1	Dokumen	4.200.000	
	333 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1	Dokumen	12.336.000	
	334 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1	Dokumen	21.605.000	
	335 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	7.580.000	
	336 Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon	1	Dokumen	35.510.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate				
	337 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Ternate	1	Dokumen	6.312.000	
	338 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara	1	Dokumen	24.200.000	
	339 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara	1	Dokumen	29.300.000	
	340 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	29.840.000	
	341 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	68.840.000	
	342 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	6.725.000	
	343 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Kapal Ferry	1	Dokumen	24.200.000	
	344 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara	1	Dokumen	30.150.000	
	345 Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara	1	Dokumen	24.200.000	
	346 Pengukuran Frekuensi Radio Kepulauan Maluku Utara	1	Dokumen	29.150.000	
	347 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	5.025.000	
	348 Ujian Amatir Radio	1	Dokumen	43.750.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang				
	349 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.975.000	
	350 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	16.487.000	
	351 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1	Dokumen	21.900.000	
	352 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.975.000	
	353 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	16.487.000	
	354 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1	Dokumen	21.900.000	
	355 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.975.000	
	356 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	16.487.000	
	357 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1	Dokumen	21.900.000	
	358 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	7.550.000	
	359 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	19.025.000	
	360 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1	Dokumen	21.900.000	
	361 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1	Dokumen	8.560.000	
	362 Ujian Negara Amatir Radio	1	Dokumen	38.750.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Gorontalo				
	363 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Gorontalo	1	Dokumen	5.350.000	
	364 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	17.850.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	365 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	26.560.000	
	366 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	67.960.000	
	367 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.350.000	
	368 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	17.850.000	
	369 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.350.000	
	370 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	17.850.000	
	371 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	5.735.000	
	372 Ujian Negara Amatir Radio	1 Dokumen	24.540.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang			
	373 Observasi Dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.890.000	
	374 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.540.000	
	375 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	16.726.000	
	376 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	56.036.000	
	377 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	7.780.000	
	378 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.180.000	
	379 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.335.000	
	380 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.310.000	
	381 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Dokumen	58.920.000	
	382 Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Dokumen	23.840.000	
	383 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.100.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Sorong			
	384 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Dokumen	4.969.000	
	385 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota dengan Transportasi Laut	1 Dokumen	46.350.000	
	386 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota dengan Sarana Transportasi Darat	1 Dokumen	31.148.000	
	387 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	30.695.000	
	388 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Dokumen	60.095.000	
	389 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.969.000	
	390 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.180.000	
	391 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.969.000	
	392 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	10.987.000	
	393 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	66.051.000	
	394 Ujian Negara Amatir Radio	1 Dokumen	62.095.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Tahuna			
	395 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.860.000	
	396 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	31.530.000	
	397 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	22.900.000	
	398 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	68.620.000	
	399 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	8.440.000	
	400 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	41.160.000	
	401 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	41.160.000	
	402 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Dokumen	81.240.000	
	403 Ujian Negara Amatir Radio	1 Dokumen	90.325.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Manokwari			
	404 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.500.000	
	405 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	46.040.000	
	406 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Dokumen	24.800.000	
	407 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	18.150.000	
	408 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	87.046.000	
	409 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.500.000	
	410 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	46.020.000	
	411 Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota	1 Dokumen	5.500.000	
	412 Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota	1 Dokumen	46.020.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
413	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Di Dalam Kota	1 Dokumen	14.330.000	
414	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Di Luar Kota	1 Dokumen	63.910.000	
415	Ujian Negara Amatir Radio Di Dalam Kota	1 Dokumen	39.490.000	
416	Ujian Negara Amatir Radio Di Luar Kota	1 Dokumen	94.294.000	
	Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju			
417	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Dokumen	5.430.000	
418	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	19.800.000	
419	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Dokumen	23.636.000	
420	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	52.470.000	
421	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Dokumen	5.430.000	
422	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	19.680.000	
423	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Dokumen	5.430.000	
424	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	19.680.000	
425	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	6.960.000	
426	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju	1 Dokumen	52.410.000	
427	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju	1 Dokumen	68.390.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta			
428	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.700.000	
429	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	9.310.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan			
430	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.440.000	
431	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.336.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung			
432	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	32.875.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang			
433	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.187.000	
434	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.959.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya			
435	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.950.000	
436	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	22.700.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda			
437	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Dokumen	6.200.000	
438	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda	1 Dokumen	38.830.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar			
439	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	21.400.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru			
440	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.825.000	
441	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.075.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang			
442	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	5.575.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta			
443	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	17.360.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar			
444	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	7.365.000	
445	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	19.130.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang			
446	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Dokumen	5.900.000	
447	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Dokumen	23.400.000	
448	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Dokumen	38.300.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado			
449	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	20.855.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura			
450	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Dokumen	7.402.000	
451	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Dokumen	48.650.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh			
452	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1 Dokumen	4.350.000	
453	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Dokumen	20.550.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam			
454	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	3.900.000	
455	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	22.799.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang			
456	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	10.565.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi			
457	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	19.300.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu			
458	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bengkulu	1 Dokumen	18.000.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung			
459	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	18.380.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak			
460	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.910.000	
461	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	20.660.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin			
462	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	22.600.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya			
463	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	22.370.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram			
464	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.835.000	
465	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	23.090.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan			
466	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.275.000	
467	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	25.850.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu			
468	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Dokumen	21.430.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari			
469	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	6.050.000	
470	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.800.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke			
471	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	7.500.000	
472	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	48.275.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari			
473	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	5.850.000	
474	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	27.856.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju			
475	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamui	1 Dokumen	5.430.000	
476	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	19.680.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon			
477	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.200.000	
478	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	21.320.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate			
479	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Dokumen	4.795.000	
480	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Dokumen	31.925.000	

AN

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang				
481	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.975.000	
482	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	16.487.000	
483	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1	Dokumen	21.900.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo				
484	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	5.350.000	
485	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	17.850.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang				
486	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	4.960.000	
487	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	20.275.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong				
488	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	2.582.000	
489	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	23.128.000	
	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna				
490	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1	Dokumen	5.110.000	
491	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1	Dokumen	34.810.000	

6

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan			
	1 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Jakarta	1 Perkara	54.950.733	
	2 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandung	1 Perkara	55.542.428	
	3 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Bandung	1 Perkara	93.054.000	
	4 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Semarang	1 Perkara	52.187.000	
	5 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Semarang	1 Perkara	83.844.000	
	6 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Yogyakarta	1 Perkara	55.970.000	
	7 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Yogyakarta	1 Perkara	90.120.000	
	8 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Surabaya	1 Perkara	54.214.000	
	9 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Surabaya	1 Perkara	85.181.000	
	10 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banda Aceh	1 Perkara	54.632.000	
	11 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Banda Aceh	1 Perkara	87.034.000	
	12 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Medan	1 Perkara	52.766.000	
	13 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Medan	1 Perkara	80.374.307	
	14 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Padang	1 Perkara	52.880.000	
	15 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Padang	1 Perkara	81.030.000	
	16 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Pekanbaru	1 Perkara	54.110.000	
	17 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Pekanbaru	1 Perkara	87.810.000	
	18 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Jambi	1 Perkara	52.974.000	
	19 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Jambi	1 Perkara	80.528.000	
	20 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palembang	1 Perkara	53.292.000	
	21 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palembang	1 Perkara	82.685.428	
	22 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandar Lampung	1 Perkara	53.586.000	
	23 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Bandar Lampung	1 Perkara	83.995.000	
	24 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Pontianak	1 Perkara	54.372.000	
	25 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Pontianak	1 Perkara	88.344.000	
	26 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palangkaraya	1 Perkara	55.510.000	
	27 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palangkaraya	1 Perkara	83.581.333	
	28 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banjarmasin	1 Perkara	53.540.000	
	29 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Banjarmasin	1 Perkara	88.980.000	
	30 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Samarinda	1 Perkara	59.778.000	

6 AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	31 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Samarinda	1 Perkara	120.376.000	
	32 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Manado	1 Perkara	55.370.000	
	33 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Manado	1 Perkara	91.850.000	
	34 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palu	1 Perkara	54.744.000	
	35 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palu	1 Perkara	96.874.000	
	36 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Makassar	1 Perkara	56.193.250	
	37 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Makassar	1 Perkara	91.866.000	
	38 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Kendari	1 Perkara	55.003.000	
	39 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Kendari	1 Perkara	91.566.000	
	40 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Ambon	1 Perkara	61.487.000	
	41 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Ambon	1 Perkara	130.898.000	
	42 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Denpasar	1 Perkara	58.739.666	
	43 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Denpasar	1 Perkara	104.793.000	
	44 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Mataram	1 Perkara	57.828.000	
	45 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Mataram	1 Perkara	95.408.200	
	46 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Kupang	1 Perkara	60.947.000	
	47 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Kupang	1 Perkara	127.845.500	
	48 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Jayapura	1 Perkara	76.479.000	
	49 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Jayapura	1 Perkara	184.643.000	
	50 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Bengkulu	1 Perkara	53.890.000	
	51 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Bengkulu	1 Perkara	81.130.000	
	52 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Serang	1 Perkara	54.971.000	
	53 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Serang	1 Perkara	85.126.000	
	54 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Batam	1 Perkara	57.673.333	
	55 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Batam	1 Perkara	106.558.000	
	56 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pangkal Pinang	1 Perkara	55.952.000	
	57 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Pangkal Pinang	1 Perkara	90.694.000	
	58 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Gorontalo	1 Perkara	53.935.500	
	59 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Gorontalo	1 Perkara	82.974.000	
	60 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Manokwari	1 Perkara	69.934.500	
	61 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Manokwari	1 Perkara	158.956.000	
	62 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Luar Kota) di Sofifi	1 Perkara	100.918.000	

6 2011

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Sub Output)			
	63 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Jakarta	1 Sampel	517.135	
	64 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bandung	1 Sampel	529.812	
	65 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Semarang	1 Sampel	531.068	
	66 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Yogyakarta	1 Sampel	532.963	
	67 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Surabaya	1 Sampel	527.984	
	68 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Banda Aceh	1 Sampel	543.077	
	69 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Medan	1 Sampel	532.797	
	70 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Padang	1 Sampel	537.620	
	71 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru	1 Sampel	539.753	
	72 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Jambi	1 Sampel	547.143	
	73 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palembang	1 Sampel	543.207	
	74 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bandar Lampung	1 Sampel	541.922	
	75 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pontianak	1 Sampel	547.444	
	76 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palangkaraya	1 Sampel	545.524	
	77 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Banjarmasin	1 Sampel	543.585	
	78 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Samarinda	1 Sampel	570.740	
	79 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Manado	1 Sampel	547.207	
	80 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palu	1 Sampel	556.790	
	81 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Makassar	1 Sampel	530.918	
	82 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Kendari	1 Sampel	554.900	
	83 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Ambon	1 Sampel	593.502	
	84 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Denpasar	1 Sampel	539.540	
	85 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Mataram	1 Sampel	544.233	
	86 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Kupang	1 Sampel	631.220	
	87 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Javapura	1 Sampel	625.022	
	88 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bengkulu	1 Sampel	548.126	
	89 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Serang	1 Sampel	599.052	
	90 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Batam	1 Sampel	685.500	
	91 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pangkal Pinang	1 Sampel	617.140	
	92 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Gorontalo	1 Sampel	604.180	
	93 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Manokwari	1 Sampel	798.300	
	94 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Sofifi	1 Sampel	771.700	

26m

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Laporan Pemeriksaan	280.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN			
	2 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	21.737.736	
	3 Program Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	15.405.650	
	4 Program Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	2.150.000	
	Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah			
	5 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	14.343.425	
	6 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.792.575	
	7 Layanan Rawat Jalan	1 Orang	1.200.000	
	Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka			
	8 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	15.027.340	
	9 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	23.042.786	
	10 Layanan Rawat Jalan	1 Orang	1.200.000	
	Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam			
	11 Rehabilitasi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Batam	1 Orang	14.468.425	
	12 Rehabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Batam	1 Orang	19.974.825	
	13 Rehabilitasi Rawat Jalan Loka Rehabilitasi Batam	1 Orang	1.200.000	
	Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda			
	14 Rehabilitasi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung	1 Orang	16.795.350	
	15 Rehabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung	1 Orang	20.235.450	
	16 Rehabilitasi Rawat Jalan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung	1 Orang	1.200.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Informasi Geopotensial dan Tanda Waktu 1 Layanan Informasi Tanda Waktu	1 Layanan Informasi	298.000.000	

1
4 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi (077)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
077.01	Mahkamah Konstitusi RI			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	1 Perkara	49.057.000	
	2 Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PI-IPU Gubernur, PI-IPU Bupati, PHPU Walikota	1 Perkara	383.014.000	

4 Abu

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
079.01	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien			
1	Laporan Hasil Reviu	1 Laporan, Dokumen	213.211.000	
	Pembinaan Peneliti Nasional			
2	Akreditasi Jurnal Ilmiah	50 Dokumen	390.390.000	
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti	1800 Dokumen	1.390.187.000	
	Konsep Pengelolaan serta Mitigasi dan Adaptasi Bencana dan Perubahan Iklim Global pada Sumber Daya Perairan Darat			
4	Kajian Pengelolaan Danau Berbasis Daya Dukung Ekosistem	5 Prototipe, Laporan	2.250.000.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien			
5	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah II Lampung (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	45.020.000	
6	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah III Banten (Kategori II)	1 Laporan, Dokumen	38.923.000	
7	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori I)	1 Laporan, Dokumen	29.640.000	
8	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori II-A)	1 Laporan, Dokumen	18.335.000	
9	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori II-B)	1 Laporan, Dokumen	25.985.000	
10	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	20.520.000	
11	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori II-A)	1 Laporan, Dokumen	46.555.000	
12	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori II-B)	1 Laporan, Dokumen	60.515.000	
13	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	44.930.000	
14	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VI Jawa Tengah (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	49.030.000	
15	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VII Yogyakarta (Kategori II)	1 Laporan, Dokumen	82.615.000	
16	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VIII Jawa Timur (Kategori II)	1 Laporan, Dokumen	74.695.000	
17	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IX Bali (Kategori II)	1 Laporan, Dokumen	97.115.000	
18	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah X Nusa Tenggara Barat (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	60.640.000	
19	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XI Sulawesi Utara (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	63.950.000	
20	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XII Maluku (Kategori II)	1 Laporan, Dokumen	111.285.000	
21	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XII Maluku (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	104.140.000	
22	Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XIII Papua (Kategori III)	1 Laporan, Dokumen	83.780.000	

6 Nov

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	99.709.000	
	2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	91.673.000	
	3 Laporan Hasil Uji Profesiensi Laboratorium Pengukuran Radioaktivitas di Lingkungan BATAN	1 Laporan	221.326.000	
	4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia	1 Laporan	266.268.000	
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas			
	5 Pengolahan Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Bekas	1 Laporan	277.648.000	
	6 Pengolahan Limbah Radioaktif Padat	1 Laporan	306.248.000	
	7 Pengolahan Limbah Radioaktif Cair	1 Laporan	504.230.000	

Abn

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Jasa Teknologi Polimer (PNBP) 1 Layanan Jasa Pelatihan Teknologi Polimer Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Litkayasa 2 Penilaian Angka Kredit JFP Tingkat Pusat SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Jasa Teknologi (PNBP) 3 Audit Internal Sistem Mutu	 14 Layanan Jasa 1 Layanan 1 Layanan Jasa	 284.620.000 370.400.000 109.338.250	

626

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur		Besaran	Keterangan
1	2	3		4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional				
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
	1 Data Antariksa dan Atmosfer (Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang)	37	GB	86.240.000	
	2 Data Antariksa dan Atmosfer (Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam)	461	GB	232.200.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial (083) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
083.01	Badan Informasi Geospasial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) 1 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi	20 Titik	964.291.000	

L Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran			
	(Sub Output)			
	Jumlah Pegawai Terdiklat			
	1 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Utama BPKP	1 Orang	8.186.967	
	2 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Madya BPKP	1 Orang	8.273.400	
	3 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Muda BPKP	1 Orang	9.144.000	
	4 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Ahli BPKP	1 Orang	11.634.900	
	5 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Terampil BPKP	1 Orang	9.930.600	
	6 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 5 Hari	1 Orang	5.470.667	
	7 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 4 Hari	1 Orang	5.089.800	
	8 Diklat JFA Penjenjangan Pengendali Teknis (Non BPKP)	1 Orang	3.544.767	
	9 Diklat JFA Penjenjangan Ketua Tim (Non BPKP)	1 Orang	3.977.833	
	10 Diklat JFA Pembentukan Auditor Ahli (Non BPKP)	1 Orang	5.026.267	
	11 Diklat JFA Pembentukan Auditor Terampil (Non BPKP)	1 Orang	4.167.033	
	12 Diklat Teknis Substansi Auditor 5 Hari (Non BPKP)	1 Orang	2.022.133	
	13 Diklat Teknis Substansi Auditor 4 Hari (Non BPKP)	1 Orang	1.836.333	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu			
	14 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	59.415.000	
	15 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	28.865.000	
	16 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	38.406.000	
	17 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	30.745.000	
	18 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	7.596.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara			
	19 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	63.872.000	
	20 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	31.447.000	
	21 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	41.298.000	
	22 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	33.327.000	
	23 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	8.613.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DKI Jakarta			
	24 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	26.070.000	
	25 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	14.890.000	
	26 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	16.110.000	
	27 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	16.350.000	
	28 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	7.370.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Barat			
	29 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	59.688.000	
	30 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	30.455.000	
	31 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	37.445.000	
	32 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	32.635.000	
	33 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	7.852.000	

ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah			
34	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	60.708.000	
35	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	25.920.000	
36	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	42.094.000	
37	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	27.740.000	
38	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	7.066.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta			
39	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	70.755.000	
40	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	35.101.000	
41	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I.	1 Laporan	44.595.000	
42	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	37.221.000	
43	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	8.601.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Timur			
44	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	60.974.000	
45	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	29.586.000	
46	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	39.349.000	
47	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	31.646.000	
48	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	7.641.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Aceh			
49	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	60.582.000	
50	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	28.543.000	
51	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	39.951.000	
52	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	30.303.000	
53	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	7.692.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Utara			
54	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	58.698.000	
55	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	27.745.000	
56	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	38.677.000	
57	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	29.565.000	
58	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	7.485.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan			
59	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	57.325.000	
60	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	27.897.000	
61	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	37.105.000	
62	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	29.777.000	
63	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	7.417.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Barat			
64	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	57.928.000	
65	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	27.765.000	
66	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	37.787.000	
67	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	29.645.000	
68	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	7.364.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Barat			
69	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	59.408.000	
70	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	28.831.000	
71	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	38.534.000	
72	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	30.710.000	
73	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	7.696.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan			
74	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	58.687.000	
75	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	28.248.000	
76	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	38.152.000	
77	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	30.128.000	
78	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	7.453.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Utara			
79	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	61.128.000	
80	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	28.454.000	
81	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	40.476.000	
82	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	30.274.000	
83	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	7.560.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan			
84	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	64.695.000	
85	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	31.033.000	
86	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	42.002.000	
87	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	33.213.000	
88	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	7.979.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku			
89	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	93.365.000	
90	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	46.738.000	
91	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	61.076.000	
92	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	48.617.000	
93	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	14.189.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bali			
94	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	80.693.000	
95	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	39.902.000	
96	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	50.734.000	
97	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	42.382.000	
98	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	9.482.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Irian Jaya			
99	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	108.855.000	
100	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	55.046.000	
101	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	84.882.000	
102	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	58.126.000	
103	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	16.600.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau			
104	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	55.327.000	
105	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	26.562.000	
106	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	36.328.000	
107	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	28.382.000	
108	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	7.323.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Lampung			
109	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	51.450.000	
110	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	25.093.000	
111	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	33.536.000	
112	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	26.973.000	
113	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	6.920.000	

Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Timur			
114	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	80.721.000	
115	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	40.731.000	
116	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	51.646.000	
117	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	42.911.000	
118	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	11.297.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jambi			
119	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	55.931.000	
120	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	27.037.000	
121	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	36.387.000	
122	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	28.857.000	
123	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	7.253.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah			
124	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	65.629.000	
125	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	30.915.000	
126	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	42.978.000	
127	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	32.735.000	
128	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	8.024.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur			
129	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	76.048.000	
130	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	37.543.000	
131	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	49.604.000	
132	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	39.723.000	
133	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	10.739.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Banten			
134	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	58.864.000	
135	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	31.994.000	
136	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	35.212.000	
137	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	33.814.000	
138	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	8.102.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Riau			
139	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	70.301.000	
140	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	35.216.000	
141	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	45.132.000	
142	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	37.039.000	
143	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	9.808.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
144	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	53.864.000	
145	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	26.181.000	
146	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	35.130.000	
147	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	28.241.000	
148	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	7.126.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
149	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	64.290.000	
150	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	31.021.000	
151	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	41.547.000	
152	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	33.261.000	
153	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	7.898.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah			
154	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	63.579.000	
155	LIIP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah	1 Laporan	30.958.000	
156	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	40.911.000	
157	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	32.718.000	
158	LIIP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	8.070.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Barat			
159	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	56.906.000	
160	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	26.218.000	
161	LIIP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	38.149.000	
162	LIIP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	28.278.000	
163	LIIP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	7.141.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Gorontalo			
164	LIIP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	58.228.000	
165	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	26.964.000	
166	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	38.837.000	
167	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	28.784.000	
168	LIIP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	7.333.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara			
169	LIIP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	70.271.000	
170	LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	33.097.000	
171	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	46.859.000	
172	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	35.277.000	
173	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	9.325.000	
	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Papua Barat			
174	LIIP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	91.062.000	
175	LIIP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	42.825.000	
176	LIIP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	60.909.000	
177	LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	45.305.000	
178	LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	12.212.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu			
179	LIIP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	30.111.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara			
180	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	33.704.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi DKI Jakarta			
181	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	15.090.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Barat			
182	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	31.657.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Tengah			
183	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	26.916.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta			
184	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	36.656.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Timur			
185	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	30.691.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Aceh			
186	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	30.033.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Utara			
187	LIIP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	29.039.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan			
188	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	29.044.000	

Atw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Barat			
189	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	28.859.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat			
190	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	30.221.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan			
191	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	29.390.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara			
192	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	29.742.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan			
193	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	32.322.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku			
194	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi	1 Laporan	54.361.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bali			
195	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	41.755.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Irian Jaya			
196	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	64.116.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau			
197	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	27.815.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Lampung			
198	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi	1 Laporan	25.982.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur			
199	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	45.122.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jambi			
200	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	28.120.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah			
201	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	31.169.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur			
202	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	41.652.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Banten			
203	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi	1 Laporan	33.490.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau			
204	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	38.577.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
205	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	27.097.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
206	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	32.169.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah			
207	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	32.600.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat			
208	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	27.149.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Gorontalo			
209	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi	1 Laporan	28.169.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku Utara			
210	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	35.932.000	
	LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Papua Barat			
211	LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	48.007.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bengkulu			
212	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	28.066.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara			
213	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	30.654.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi DKI Jakarta			
214	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	13.650.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Barat			
215	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	29.455.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Tengah			
216	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	24.941.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta			
217	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	34.598.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Timur			
218	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	28.673.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Aceh			
219	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	27.795.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Utara			
220	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	26.885.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan			
221	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	27.017.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Barat			
222	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	26.886.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat			
223	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	27.986.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan			
224	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	27.407.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara			
225	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	27.673.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan			
226	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	30.072.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku			
227	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	46.152.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bali			
228	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	39.382.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Irian Jaya			
229	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	53.427.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau			
230	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	25.582.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Lampung			
231	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	23.974.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur			
232	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	39.988.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jambi			
233	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	26.157.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah			
234	LIIP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	30.335.000	

6 Ag

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur			
235	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	36.524.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Banten			
236	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	31.550.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau			
237	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	34.612.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
238	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	24.941.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
239	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	30.022.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah			
240	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	30.437.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat			
241	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	24.979.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Gorontalo			
242	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	26.043.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku Utara			
243	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	31.937.000	
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Papua Barat			
244	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	41.705.000	

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial (100)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	Komisi Yudisial			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Investigasi Hakim			
	1 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus	45 Laporan	1.905.345.000	
	2 Laporan Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan	6 Laporan	672.120.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Investigasi Hakim			
	3 Laporan investigasi di pengadilan tingkat pertama/banding/Mahkamah Agung	1 Laporan	4.900.000	

L. Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	218 Penyelenggaraan	3.125.730.000	

Agan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001